

MEMORIA PASSIONIS PAPUA

KRONIK HAK ASASI MANUSIA 2014

TIM PENULIS SKPKC
FRANSISKAN PAPUA



SEKRETARIAT Keadilan, Perdamaian dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

Memoria Passionis Papua:
Kronik Hak Asasi Manusia 2014

Copyrights © 2016 SKPKC Fransiskan Papua

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh SKPKC Fransiskan Papua,
Juli 2016

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura
Papua 99352
www.fransiskanpapua.net
Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis: Tim SKPKC Fransiskan Papua
Editor : Bernard Koten
Penyelia Bahasa: Basil Triharyanto
Lay out: Lintang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI — i

Pengantar Penulis — iii

BAB 1 PENYELENGGARAAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Penyelenggaraan Pemerintah — 1
2. Pendidikan — 7
3. Kesehatan — 10
4. Otonomi Khusus Papua — 15
5. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat — 23
6. Pemekaran Wilayah — 24
7. Korupsi — 27
8. Kesejahteraan Umum — 36
9. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) — 39

BAB 2 RUANG EKSPRESI DAN KEBEBASAN WARGA

1. Kebebasan Warga dan Aspirasi Politik — 53

BAB 3 SUMBER DAYA ALAM, INVESTOR, DAN HAK ULAYAT

1. Pertambangan PT Freeport dan Persoalannya — 61
2. Sumber Daya Alam dan Hak Ulayat — 65

BAB 4 PERTAHANAN KEAMANAN DAN KINERJANYA

1. Pertahanan dan Keamanan — 71

BAB 5 KONFLIK DAN PERDAMAIAN

1. Konflik Pegunungan Tengah — 81
2. Tragedi Paniai 8 Desember — 89
Advokasi Kasus Paniai— 95
3. Kelompok Kriminal Bersenjata — 99
4. Konflik dan Rekonsiliasi — 101
5. Dialog Damai — 103

BAB 6 LINTAS BATAS: KABUPATEN KEEROM

1. Perbatasan Keerom — 105

PENGANTAR PENULIS

Hadir lagi di tengah kita buku *Memoria Passionis Papua 2014*, buku yang mencoba menceritakan kembali kronik pergumulan dan perjalanan di Tanah Papua sepanjang tahun 2014. Pada kesempatan ini, *Buku Memoria Passionis Papua 2014* ini hanya berisikan catatan kronik. Dengan kehadiran buku tersebut, kita kembali diingatkan akan sejumlah pengalaman dan pergumulan yang telah kita alami di Tanah Papua. Catatan kronik yang ditampilkan di dalam buku ini bersumber dari beberapa media baik cetak maupun internet.

Para pengumpul/penulis kronik buku ini membagikan kronik-kronik tersebut berdasarkan tema-tema umum tentang hak asasi

manusia (HAM). Penyelenggaraan dan Kebijakan Pemerintahan (pusat dan daerah) akan mengawali cerita kronik di dalam buku ini. Beberapa poin yang termasuk di dalamnya seperti perdebatan Otonomi Khusus Papua, persoalan Pendidikan dan Kesehatan, suasana Pemilihan Umum, peranan MRP dan MRPB, Korupsi yang masih merajalela akan menjadi bagian 'menu' di dalam cerita kronik Penyelenggaraan dan Kebijakan Pemerintahan. Pada bagian berikutnya kronik terkait situasi politik seperti ruang ekspresi, yang masih menuntut pembenahannya hadir di dalam buku ini.

Kronik situasi Pegunungan Tengah Papua akan mengingatkan kita kembali sejumlah peristiwa seperti konflik dan penyelesaiannya. Pada bagian akhir, catatan kronik terkait dialog damai akan membantu untuk mengingat kembali sejauh mana usaha dari pihak yang terus berjuang agar perdamaian itu dapat diwujudkan di Tanah Papua.

Kiranya sejumlah catatan kronik yang terekam selama 2014 ini membantu kita untuk mengingat kembali segala pergumulan di Papua demi membangun sebuah semangat yang baru untuk bersama-sama menciptakan keadilan, kebenaran, dan kedamaian di Tanah Papua ini.

Selamat membaca.

Salam hangat

Tim SKPKC Fransiskan Papua

Bab I

PENYELENGGARAAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

6 Januari

Ketua DPR Papua Deer Tabuni memberi apresiasi kepada Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal yang melakukan terobosan untuk membangun Papua. Terobosan itu seperti upaya peningkatan APBD Provinsi Papua 11 triliun pada 2014. 11 triliun itu berasal dari 4 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus), 2 triliun dana infrastruktur dan sisanya dari pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. (*Cepos*)

9 Januari

Terkait dana tambahan infrastruktur Otsus tahun 2014, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Papua Hendrik Dance Udam dan Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Robet Jitmau mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua bisa menggunakan dana tersebut untuk membangun pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua pada tahun 2014. (*Cepos*)

11 Januari

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Letnan Jenderal Bambang Darmono mengungkapkan, untuk percepatan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, UP4B telah berhasil mendorong pemberantasan buta aksara dan pengembangan PAUD. UP4B menyatakan telah berhasil mendorong pembentukan PAUD sebanyak 80 unit, SD dan SMP berjumlah 413 unit serta penyediaan guru SD-SMP di daerah sebanyak 877 guru. (*Cepos*)

Kepala Kampung Distrik Kelila Mamberamo Tengah Yagabur Elien Yikwa, Jumat (10/1), mempertanyakan, sisa dana Respek mandiri tahun 2011 yang belum direalisasikan oleh pendamping Respek. (*Cepos*)

13 Januari

Kepala UP4B Bambang Darmono mengatakan, pihaknya telah berhasil mendorong berbagai macam program demi peningkatan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua. Salah satunya dengan mengadakan tenaga pengajar pendidikan, khususnya bagi kawasan pegunungan (*Bintang Papua*).

17 Januari

Solidaritas Mama-mama Asli Papua melakukan aksi demo, Kamis (16/1), pada saat rapat paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2014 dan persetujuan rancangan undang-undang RI tentang Pemerintahan

Otonomi Khusus di Tanah Papua serta Raperdasi non-APBD. Dalam aksi tersebut Solpap mendesak untuk bertemu dengan gubernur, ketua DPR Papua dan walikota untuk membicarakan nasib mereka. (*Cepos & Bintang Papua*)

Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama para bupati serta walikota dan pimpinan DPRD se-Papua menetapkan RAPBD Papua Tahun 2014 sebesar 11 triliun lebih. (*Cepos*)

Gubernur Lukas Enembe pada Kamis, 16 Januari, di Hotel Sahid Jayapura, menegaskan tidak ada pengadaan mobil dinas pada tahun 2014. Ia akan mencoret seluruh program pembelian atau pengadaan kendaraan pada tahun 2014. (*Cepos*)

21 Januari

Sekretaris Umum DAP Willem Rumaseb pada Senin (20/1) di Jayapura mengatakan, DAP menolak RUU Pemerintahan Otsus Papua karena dinilai tidak ada jaminan untuk mensejahterakan rakyat Papua. (*Cepos*)

24 Januari

Wakil Walikota Jayapura Nur Alam di Hotel Relat pada Kamis (23/1) mengatakan Pemkot Jayapura telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.040.000/bulan. (*Suluh Papua*)

25 Januari

Kepala Kantor Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Jayapura Agus Haryadi pada Jumat (24/1), mengungkapkan banyak warga Kabupaten Jayapura yang malas mengurus surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena tidak puas dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya sosialisasi kepada publik. (*Suluh Papua*)

12 Februari

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, dalam sambutannya pada launching Gerbang Mas Hasrat Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Rabu (12/2) mengungkapkan Gerakan

Gerbang Mas Hasrat Papua merupakan gerakan untuk membangun Papua lebih baik. Menurut Klemen pertemuan dengan seluruh mitra kerja merupakan suatu langkah yang baik. (*Papua Pos*)

6 Mei

Puluhan Kepala Kampung di Wamena pada Senin (5/5) ke Kantor Bupati Jayawijaya menuntut insentif per triwulan Januari – Maret 2014. Menurut Sekda Jayawijaya Yohanis Walilo, keterlambatan pembayaran insentif kepada Kepala Kampung di distrik karena Kepala Distrik atau Kepala Kampung terlambat menyerahkan surat pertanggungjawaban. (*Suluh Papua*)

13 Mei

Sebanyak 131 tenaga honorer K2 yang tidak lulus dalam pengumuman CPNS Kabupaten Yapen, Senin (12/5), menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Yapen. Mereka menilai seleksi dan pengumuman CPNS tidak sesuai dengan aturan. (*Suluh Papua*)

16 Juni

Kepala BPKD Bambang Wirawan di Kantor Walikota Kota Jayapura pada Jumat (13/6), menyatakan pihaknya akan mengatur ulang struktur penggajian pegawai dari golongan 1A hingga 4E di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai dengan masa kerja pegawai memang perlu diolah kembali, artinya golongan 1A lulusan Sekolah Dasar dengan masa kerja beberapa akan distrukturisasi penggajian. (*Suluh Papua*)

17 Juni

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Ellia I. Loupatty di Hotel Aston Kota Jayapura pada Senin (16/6), meminta agar pelayanan pembangunan kesejahteraan sosial lebih berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Lebih lanjut dikatakan bahwa fokus prioritas ini harus terlihat melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas pada 5 wilayah adat di 15 kabupaten induk sebelum

Otsus Papua dan penambahan lagi menjadi 15 kabupaten. (*Suluh Papua*)

30 Juni

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar di Jayapura mengakui masih ada perusahaan atau pengusaha yang belum membayar upah tenaga kerja sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk perusahaan yang belum membayar tenaga kerja sesuai dengan UMP tersebut, memang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua, dengan memberikan himbauan dan usulan penanggulangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. (*Cepos*)

18 September

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Donatus Mote mengatakan tahun 2014 baru 30 % dana Respek yang diterima oleh Badan Pemberdayaan Kampung Setda Provinsi Papua. Dana tersebut telah disebarakan ke kabupaten/kota di seluruh Papua melalui rekening kas daerah pada bulan Juli. (*Suluh Papua*)

22 September

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pemerintah Kampung (BPMK) Adul Rahman Basri mengatakan seiring dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang UU Desa, maka masyarakat adat diberikan kesempatan untuk membangun kampung. Maka dari itu harus ada sinergitas masyarakat adat dengan pemerintah kampung untuk membangun daerah mereka masing-masing. (*Suluh Papua*)

6 Oktober

Sejumlah tokoh Papua yang terdiri dari tim relawan lembaga masyarakat adat Papua, tokoh agama dan perempuan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Rumah Transisi Jakarta. Pada pertemuan tersebut tim menyerahkan sejumlah hasil rekomendasi terkait rancangan pembangunan Tanah Papua selama

lima tahun kepemimpinan Jokowi. Rekomendasi yang diberikan itu, menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Lenis Kogoya berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi seperti pasar mama-mama Papua dan rumah adat Papua. (*Cepos*)

7 Oktober

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Doyo, Tingkos Sitanggung mengungkapkan bahwa saat ini pencarian terhadap 19 Napi yang kabur langsung ditangani Polda Papua yang dibantu oleh jajaran Polres bersama petugas Lapas. (*Bintang Papua*)

10 Oktober

Asisten I Bidang Pemerintah Sekda Provinsi Papua Doren Wakerwa mengatakan program PNPM Mandiri merupakan program nasional yang harus benar-benar memandirikan masyarakat di kampung-kampung. Selain itu masyarakat harus bertanggung jawab melaksanakan program yang telah disepakati bersama pendamping. (*Bintang Papua*)

8 November

Adanya pihak pemerintah Provinsi Papua yang tak sependapat dengan program transmigrasi dan pemekaran provinsi yang disuarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ditanggapi akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura Martinus Solossa. Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan usulan pemekaran provinsi di Papua, begitu juga dengan program transmigrasi. Pasalnya untuk pemekaran provinsi sudah sesuai dengan amanat Otsus. (*Cenderawasih Pos*)

18 November

Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai Universitas di Kota Jayapura menduduki halaman kantor DPR Papua untuk menolak secara tegas program transmigrasi dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. (*Suluh Papua*)

20 November

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan untuk menolak memasukan transmigrasi ke Papua, terkait dengan masalah tersebut Ketua Dewan Adat Keerom Herman Yoku menilai bahwa masuknya transmigrasi itu sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah di Papua, sehingga pemerintah provinsi harus melakukan koordinasi dengan daerah yang setuju maupun yang tidak setuju. (*Cenderawasih Pos*)

24 November

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan pemerintah yang dipimpnnya saat ini akan lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang menitikberatkan pada proteksi kepada orang asli Papua yang miskin dan tertinggal. Hal ini dimaksudkan agar orang asli Papua bisa bangkit, maju, mandiri dan lebih baik lagi. (*Bintang Papua*)

29 November

Penanganan sejumlah kasus HAM masa lalu belum akan selesai dalam waktu dekat. Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan selain sejumlah berkas perkara masih harus diperbaiki, Presiden Joko Widodo dalam arahannya juga belum menjadikannya sebagai prioritas penuntasan hukum. (*Cepos*)

2. PENDIDIKAN

13 Januari

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di ruang kerjanya pada Jumat (10/1), mengungkapkan kekurangan guru menjadi kendala pembangunan pendidikan di Kabupaten Jayapura. Pada saat ini Kabupaten Jayapura masih mengalami kekurangan tenaga guru di bidang kejuruan. (*Bintang Papua*)

20 Januari

Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan mutu pendidikan terutama di Kota Jayapura perlu ditingkatkan. Mano

meminta agar pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jayapura menunjukkan kualitas dan mutu pendidikan dengan baik, fungsi guru diutamakan, peningkatan ruang belajar, sarana dan prasarana pendidikan terus diperhatikan. (*tabloidjubi.com*)

25 Januari

Ketua Komisi E DPR Papua Kenius Kogoya mengatakan, gangguan keamanan yang kerap kali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya menjadi salah satu penyebab banyak guru yang ada di wilayah itu mangkir dari tugas mengajar di sekolah. Banyak guru merasa takut dan merasa tidak nyaman karena wilayah tersebut selalu terjadi konflik. (*Suluh Papua*)

6 Mei

Guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman Papua kebanyakan tidak betah di tempat tugasnya. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat. Menurut Wakil Bupati Asmat Yulius Patandianan, yang betah dan bertahan di tempat tugas adalah guru-guru yang dikontrak dari luar, sedangkan mereka yang PNS tidak mau menjalankan tugasnya. (*Suluh Papua*)

12 Mei

Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua melakukan pemetaan terhadap kehadiran guru. Hal ini bertujuan mengetahui kehadiran para guru di sekolah-sekolah. Menurut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Papua Elias Wonda, pemetaan ini sudah dilakukan. Usaha ini dilakukan atas kerja sama dengan lembaga mitra seperti Unicef, Universitas Cenderawasih dan Universitas Negeri Papua. (*Cenderawasih Pos*)

2 Oktober

Sesuai dengan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan LPMP Papua jumlah 11.461 orang guru yang ada di Papua baru 1.224 berkualifikasi S1 atau 10,6 persen. Hal ini menandakan jika jumlah guru yang memiliki dasar pendidikan standar sarjana masih sangat minim. (*Bintang Papua*)

13 Oktober

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Papua Aloysius Jopeng mengatakan dari 12 ribu guru SD yang tersebar di seluruh Provinsi Papua baru 60 persen yang telah melaksanakan program Pemerintah Pusat KI3. Program KI3 merupakan kurikulum 2013 pada tahun 2014 dari jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA/SMK. (*Suluh Papua*)

13 November

Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan anggaran pendidikan kepada dinas-dinasnya untuk memerangi buta aksara mengingat jumlah buta aksara di Papua masih menjadi pertama di Indonesia dengan jumlah 615.977 orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda. (*Cepos*)

15 November

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda mengatakan, disamping masih kurangnya pemahaman guru-guru dalam mengimplementasi kurikulum 2013, buku panduan yang digunakan guru maupun siswa masih minim. Oleh karena itu pihaknya mengambil inisiatif untuk tidak memberlakukan kurikulum 2013 kepada pelajar kelas 3 SMP dan 3 SMA, 3 SMK dan 6 SD, sebab hal ini dapat merugikan mereka yang hendak lulus. (*Cepos*)

20 November

Anggota DPR Papua Natan Pahabol mengatakan masalah pendidikan terutama di wilayah pedalaman Papua masih merupakan tantangan besar yang harus dicarikan solusinya. Karena fasilitas belajar dan mengajar masih amat kurang seperti perpustakaan dan buku pelajaran, meja serta kursi yang masih minim. (*Cepos*)

3. KESEHATAN

2 Januari

Ketua KPA Kabupaten Asmat Y. Patandinan mengungkapkan pada tahun 2013 KPA Kabupaten Asmat menemukan 103 kasus HIV/AIDS. Kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya 2012 sebanyak 85 kasus, pada 2007 1 kasus HIV/AIDS. Menurutnya, KPA Asmat pada tahun 2014 lebih fokus pada penyuluhan kepada generasi muda tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS. (*Suluh Papua*)

6 Januari

Direktur RSUD Abepura Aloisius Giyai mengatakan, minuman keras saat ini masih menjadi penyebab utama kematian orang asli Papua. Selain itu Miras menjadi pemicu kriminal penganiayaan KDRT serta kecelakaan berlalulintas dan sex bebas. (*Cepos*)

13 Januari

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan sejak 1 Januari 2014 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum berjalan maksimal di Kabupaten Jayapura. Penyebabnya adalah minimnya sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Puskesmas. (*Bintang Papua*)

16 Januari

Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jayapura Rafius Rorangi mengatakan, BPJS harus ditinjau ulang karena banyak dokter yang dirugikan dalam program tersebut. (*Cepos*)

17 Januari

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan HIV Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nyoman Sri Antari pada Kamis (16/1), mengatakan berdasarkan data 31 September 2013 penderita HIV mencapai 15.577 HIV. Kasus ini ditemukan di 28 kabupaten dan Kota Jayapura. Walaupun demikian baru 16 kabupaten yang sudah melaporkan data, sementara 13 kabupaten belum melaporkan data penderita

HIV. Dipastikan jumlah penderita HIV bertambah jika laporan dari 13 kabupaten tersebut masuk. Lebih lanjut Nyoman mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih keterbatasan alokasi dana untuk membiayai semua kebutuhan rumah sakit di tingkat kabupaten. (*Papua Post*)

20 Januari

Tiga dokter spesialis yang bertugas di RSUD Manokwari meninggalkan rumah sakit karena mereka menilai manajemen rumah sakit tidak berjalan baik. (*Cepos*)

Kepala Badan Narkotika Papua Antonius Kardarmata mengungkapkan, Papua membutuhkan pusat rehabilitasi korban narkoba. Alasannya di Papua pengguna narkoba sangat besar. (*Suluh Papua*)

21 Januari

Kepala Pusat Studi Penanggulangan HIV/AIDS Uncen Jhon Rahail di Aula Fisip Universitas Cenderawasih pada Senin (20/1), mengungkapkan kasus HIV/AIDS hingga September 2013 di Papua meningkat tajam. Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS tercatat 15.577 kasus. Masing-masing kasus HIV 6.100 dan AIDS sebanyak 9.477 kasus. Temuan-temuan kasus muncul dari daerah pinggiran, pedalaman yang mana 70 persen adalah penduduk Papua. (*Suluh Papua*)

24 Januari

Direktur RSUD Serui Widayanto di RSUD Waina Kawini pada Kamis (23/1) mengungkapkan RSUD Serui masih kekurangan tenaga dokter spesialis seperti dokter kandungan, penyakit dalam dan THT. Selain itu minimnya intensif bagi dokter spesialis menyebabkan para dokter malas bertugas di Serui. (*Suluh Papua*)

Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya Gaad Tabuni di Wamena pada Kamis (23/1), mengatakan sebanyak 1.000 kasus HIV/AIDS ditemukan di Puskesmas Wamena Kota per-Januari 2014.

Menurutnya, data tersebut diperoleh dari hasil laporan Puskesmas Wamena Kota. Penyebaran HIV AIDS terjadi karena hubungan seks bebas. (*Suluh Papua*)

25 Januari

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano di Puskesmas Kotaraja pada Jumat (24/1) mengharapkan semua Puskesmas di Kota Jayapura membuka pelayanan selama 24 jam. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan anak. (*Suluh Papua*)

27 Januari

Ketua Harian KPA Kota Jayapura Nur Alam pada Kamis, 23 Januari 2014 mengakui Pemkot Jayapura telah menghibahkan dana untuk KPA Kota Jayapura sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut untuk digunakan menanggulangi maraknya kasus HIV/AIDS. (*Suluh Papua*)

29 Januari

Kapala Puskesmas Distrik Lereh Sentani Barat Kabupaten Jayapura Laly di ruang pertemuan Dinkes Kabupaten Jayapura pada Selasa, 28 Januari, mengungkapkan petugas kesehatan di Distrik Lereh sangat kurang. Hal ini menyebabkan kepala Puskesmas setempat selalu merangkap sebagai apoteker dan perawat. (*Suluh Papua*)

4 Februari

Kepala Puskesmas Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura dr. Lily mengungkapkan, penyakit pernapasan (ISPA) masih dominan di Distrik Lereh. Selain itu warga Lereh kurang menyadari akan pentingnya kebersihan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) drg. Aloysius Giyai menuturkan Kartu Papua Sehat (KPS) yang telah diluncurkan pada 2 Desember 2013 diharapkan digunakan secara baik oleh petugas kesehatan di kampung-kampung. Jika KPS telah diberlakukan di setiap kampung, tak ada lagi keluhan warga terkait pelayanan kesehatan. Pasalnya, kartu itu bersama kartu Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) membantu biaya layanan kesehatan. (*Suluh Papua*)

6 Februari

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dr Doralina Breving pada Selasa, 4 Februari, mengungkapkan angka kematian ibu hamil di Kota Jayapura terus menurun. Menurutnya, pada Desember 2013 telah tercatat ada 8 kasus kematian ibu ketika melahirkan. Karena itu pemerintah kota (Pemkot) terus berupaya menekan dengan cara memberi penyadaran kepada kaum ibu-ibu. (*Bintang Papua*)

12 Mei

Gedung Pustu di Kampung Skouw Yambe dirusak oleh warga. Menurut Kepala Kampung Skouw Yambe Frits Maurits Pattipeme, masyarakat merasa kesal dengan pelayanan di Pustu Skouw sehingga masyarakat merusaknya. Hal ini terjadi ketika warga membawa anaknya yang dipatuk ular untuk berobat tetapi petugas yang ada di Pustu tidak bisa membantu. (*Cepos*)

24 Mei

Ketua KPA Kota Jayapura Nur Alam mengatakan jumlah penderita HIV-AIDS di kota Jayapura sebanyak 3.242 orang, HIV berjumlah 379 orang dan AIDS berjumlah 2.863 orang, sedangkan yang sudah meninggal adalah 172 orang. (*Suluh Papua*)

19 Juni

Tokoh masyarakat Amungme Nerijs Katagame di Timika pada Rabu (18/6), mengatakan bahwa Puskesmas Agimuga selama tiga bulan tidak melayani pasien. Selanjutnya dikatakan bahwa akibat penutupan Puskesmas tersebut banyak warga yang menderita penyakit dan tiga di antaranya sudah meninggal dunia. Minimnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Agimuga menyebabkan sudah banyak warga setempat yang menderita penyakit. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan terpaksa harus berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh ke Aramsolki untuk mendapatkan layanan kesehatan di salah satu Puskesmas Pembantu

(Pustu) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk mendapatkan perawatan medis. (*Suluh Papua*)

5 November

Kepala Puskesmas Ninia Aser Arungkuan mengeluhkan kesediaan stok obat yang terbatas. Dirinya mengharapkan agar Pemkab Yahukimo melalui instansi terkait dapat mendistribusikan obat guna kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat. (*Cepos*)

13 November

Dari hasil pemeriksaan terhadap 6.410 orang di Merauke selama 9 bulan sejak Januari-September 2014 sebanyak 77 orang positif HIV/AIDS, dimana 8 diantaranya berstatus PNS di Merauke. (*Cepos*)

19 November

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Silvanus A. Sumule mengatakan bahwa kasus HIV/AIDS hingga 30 Juni 2014 mencapai 17.639 orang. Dari jumlah itu 1229 orang diantaranya telah meninggal dunia. Sedangkan khususnya wilayah Meepago yang meliputi Nabire, Paniai, Dogiai jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 6.984 dan 446 diantaranya telah meninggal. Angka ini masih jauh lebih kecil karena ada beberapa kabupaten yang belum menyampaikan datanya. (*Cepos*)

21 November

Kepala Puskesmas Waena, Kota Jayapura Korina Beris mengungkapkan, dari data tahun 2011 hingga 2014 tercatat ada 28 orang yang positif mengidap HIV/AIDS. Dari 28 orang ini seluruhnya dalam usia produktif dari 8 diantaranya adalah ibu hamil. Sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendampingan terhadap warga tersebut. (*Cepos*)

25 November

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Ephraim

Alosius mengatakan penderita kasus HIV/AIDS hingga Agustus 2014 telah mencapai 362 kasus penderita yang telah positif terinfeksi penyakit mematikan tersebut. (*Suluh Papua*)

1 Desember

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan data September 2014 menyebutkan resiko penularan AIDS tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual. Jumlah kumulatif kasus infeksi HIV tertinggi ada di DKI Jakarta, dengan 32.249 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur dengan 19.249 kasus dan Papua sebanyak 16.051 kasus. Sedangkan kasus AIDS tertinggi ada di Papua dengan 10.184 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 8.976 kasus dan DKI Jakarta yang berjumlah 7.477 kasus. (*Cepos*)

4. OTONOMI KHUSUS

6 Januari

Terkait Otonomi Khusus (Otsus) Plus Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman pada Minggu, 5 Januari 2014 mengatakan, upaya gubernur dan tim asitensinya patut diapresiasi karena berjuang memikirkan kemajuan rakyat Papua ke arah yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Otsus Plus bukan solusi substansi masalah Papua. (*Papua Pos*)

13 Januari

Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen pada Sabtu, 11 Januari 2014 di GOR Waringin, Kotaraja, Jayapura, mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Otsus bagi Papua lebih dari Rp 4 triliun, dengan pembagian 80 persen dikelola kabupaten/kota dan 20 persen dikelola oleh provinsi. (*Bintang Papua*)

15 Januari

Sekretaris Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan dana Otsus senilai Rp 4 triliun pada tahun 2014 tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. (*Bintang Papua*)

16 Januari

Gubernur Lukas Enembe mengakui draf RUU telah diserahkan ke DPR Papua. Menurut Lukas, sesudah di DPR Papua akan diparipurnakan untuk disahkan menjadi undang-undang Otsus Plus. (*Cepos & Bintang Papua*)

17 Januari

Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengisyaratkan jika Pemerintah Pusat tidak menyetujui draf UU Otsus Plus, maka itu sama saja rakyat Papua meminta refrendum dari hasil rekomendasi MRP. Hal tersebut ditanggapi serius oleh Ketua I KNPB Agus Kosay mengatakan, gubernur dan MRP tidak perlu memboncengi isu refrendum sebagai nilai tawar ke Pemerintah Indonesia. (*Bintang Papua*)

21 Januari

Wakil Ketua II DPR Papua Barat Jimmy Demianus Ijje pada Senin, 20 Januari 2014 di Hotel Aston Jayapura mengungkapkan, draf Otsus Plus tidak boleh ada aturan yang di dalamnya mengancam kesatuan NKRI. Terkait dengan RUU Pemerintahan Papua Jimmy mengatakan RUU tersebut tidak memasukan masyarakat non-Papua di dalamnya. (*Suluh Papua, Cepos & Bintang Papua*)

22 Januari

Ketua Komisi D DPR Papua Yan Permenas Mandenas menilai penetapan draf undang-undang Pemerintah Provinsi Papua yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR Papua pada Senin, 20 Januari, terkesan dipaksakan dan tertutup (*Bintang Papua*)

23 Januari

Katua MRP Timotius Murib mengharapkan RUU Pemerintahan Papua harus berpihak kepada masyarakat asli Papua. Pihak MRP akan mengajak masyarakat Papua untuk referendum seandainya pemerintah pusat tidak berpihak ke orang asli Papua. Harus ada ancaman referendum agar Pemerintah RI konsisten. (*Bintang Papua & Cepos*)

24 Januari

Budi Setyanto dari ICS mengatakan isi dari UU Pemerintahan Papua hanya diterima 25 persen saja oleh pemerintah pusat, 75 persen akan ditolak oleh pemerintah pusat. (*Bintang Papua*)

Wakil Ketua Baleg DPR Papua Albert Bolang menyerahkan revisi draf RUU Pemerintahan Papua kepada Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (23/1). Penyerahan draf RUU Pemerintahan disaksikan oleh Ketua MRP Timotius Murib dan Ketua MRPB David Maisiro. (*Cepos*)

28 Januari

Dekan Fakultas Hukum Uncen Hendrik Krisifu di ruang kerjanya pada Senin, 27 Januari mengatakan ada posisi tawar menawar antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua di pasal 299. Menurutnya, pasal tersebut memberikan tawaran referendum jika perubahan Otsus tidak dilaksanakan. Selain itu Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar) Philipus Robaha mengatakan, politik yang dimainkan oleh pemerintah saat ini adalah politik anak kecil karena sebagian masyarakat Papua tidak mengerti dengan RUU Pemerintahan Papua tersebut. Pemerintah Papua menggunakan kata referendum untuk kepentingan sepihak dan mengorbankan rakyat kecil. (*Suluh Papua*)

30 Januari

Gubernur Lukas Enembe menegaskan pengusulan draf RUU Pemerintahan Papua merupakan solusi terakhir untuk

menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Menurutnya, perjuangan RUU Pemerintahan Papua ini masih dalam kerangka NKRI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengungkapkan, draf RUU Pemerintahan Papua lebih banyak berbicara tentang kesejahteraan perekonomian rakyat di Tanah Papua dibandingkan masalah politik Papua. (*Cepos*)

12 Februari

Terkait dengan RUU Otsus, Wakil Ketua Tim Asistensi Papua Barat Agus Sumule mengatakan, hal penting yang ada dalam RUU Otsus Plus yakni senantiasa mengacu pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008. Antara lain terkait dengan adanya hirarki kekuasaan antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot, definisi OAP yang mengacu pada tiga pihak selaku subjek yaitu orang asli Papua, Orang Papua dan Penduduk Papua, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). (*Papua Pos*)

17 Februari

Staf khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Felix Wanggai pada Sabtu, 15 Februari 2014 di Hotel Lumire Jakarta, menjelaskan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh tim asistensi Papua dan Papua Barat mengenai Pembobotan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua adalah demi kesejahteraan orang Papua. Dalam penandatanganan kesepakatan bersama itu, Felix Wanggai juga menyerahkan hasil kesepakatan yang telah ditangani bersama kepada kedua tim asistensi untuk dibawa ke Papua dan dilaporkan kepada gubernur dan ketua DPR Papua dan Papua Barat, termasuk MRP dan MRPB. (*papuapos.com*)

15 September

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan Permenas Mandenas menentang usaha Pemprov Papua bersama beberapa pihak

yang mendorong disahkannya draf Undang-Undang Otsus Plus oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Yan menuturkan, draf Otsus Plus tidak mungkin disahkan oleh DPR RI karena pembahasan draf Otsus Plus tidak bisa selesai dalam waktu satu atau dua hari tetapi membutuhkan waktu dua atau tiga tahun. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

16 September

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya sudah menantangani draf Otsus Plus terakhir dan akan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. (*Cepos*)

Rencana Pemprov Papua, rombongan para bupati, walikota, ketua DPRD, DPR Papua, MRP ke Jakarta untuk mendorong RUU Otsus Plus menjadi UU dinilai sebagai pemborosan anggaran oleh Ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan P. Mandenas. Pernyataan Mandenas ditanggapi oleh Sekretaris Tim Asistensi Provinsi Papua Doren Wakerkwa. Menurut Doren, tidak ada pemborosan dalam upaya untuk memperjuangkan RUU Otsus Plus karena sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang jelas. (*Cepos*)

17 September

Ketua Baleg DPR RI Ignasius Mulyono mendesak Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan surat presiden (Supres) yang akan dijadikan dasar oleh DPR RI terkait pembahasan RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Tanah Papua. (*Bintang Papua*)

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otsus bagi Provinsi Papua secara resmi masuk dalam Prolegnas. Dalam upaya memperjuangkan RUU Otsus Plus, Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Deer Tabuni, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, para bupati dan wali kota serta ketua DPRD se-Provinsi Papua hadir dalam dengar pendapat di Gedung Nusantara III DPR RI. (*Cepos*)

18 September

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar pembahasan RUU Otsus Plus bisa dituntaskan oleh DPR-RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam dua hari ini sampai 20 September 2014. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. (*Suluh Papua*)

19 September

Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono menyepakati 5 kerangka dalam perubahan RUU Pemerintahan Otsus Plus bagi Provinsi Papua. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Surat Presiden (Supres) tertanggal 17 September 2014. Staf Khusus Presiden Felix Wanggai mengatakan, kelima kerangka utama antara lain: Pertama, menyangkut kewenangan yang lebih luas dan khusus bagi pemerintah Papua dan Papua Barat dalam aspek hubungan luar negeri, rencana tata ruang pertahanan dan pembinaan karir orang asli Papua di TNI/Polri. Kedua, menyangkut kebijakan strategis pembangunan. Ketiga, kerangka keuangan daerah, memuat kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat khusus/afirmatif. Keempat, kerangka kelembagaan pemerintah, penguatan peran dan kewenangan gubernur, MRP, DPR Papua dan kelima, kerangka politik yang bersifat rekonsiliatif. Rancangan UU ini sebagai sarana untuk membangun perdamaian, penguatan rekonsiliasi dan partisipasi masyarakat Papua. (*Cepos*)

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Supres Otsus Plus 18 September 2014. Dengan penandatanganan surat tersebut Felix Wanggai mengatakan UU Pemerintahan Otsus Plus bisa menjawab seluruh permasalahan yang selama ini terjadi di Tanah Papua. (*Bintang Papua*)

22 September

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Provinsi Papua dipastikan telah masuk dan siap untuk dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menurut Ketua DPR Papua

Yunus Wonda, dengan masuknya RUU Otsus Plus ke Baleg DPR RI diperkirakan tanggal 25 atau 28 sudah mendapat keputusan. (*Cepos*)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan Mandenas bersikukuh bahwa RUU Otsus Plus terkesan dipaksakan dan pemborosan uang rakyat. Dalam keterangannya Yan mengatakan dana yang telah dihabiskan mencapai miliaran rupiah, serta adanya permintaan “dana lobby” tambahan mendahului APBD 2015 sebesar Rp 50 miliar sehingga total “dana lobby” mencapai Rp 65 miliar. Meski pun hal ini dibantah oleh Ketua DPR Papua, MRP dan DPRD perwakilan kabupaten/kota serta sejumlah pejabat teras provinsi. (*Suluh Papua*)

23 September

Dosen HI Fisip Uncen dan pengamat sosial politik Papua Marinus Yaung mengatakan, Papua akan semakin cepat menuju referendum di Tahun 2015 apabila RUU Otsus Plus disahkan oleh DPR RI. Alasannya, seharusnya elit politik di pusat bertanya dan sekaligus menganalisa mengapa sampai draf Otsus Plus lebih banyak dikonsultasi atau disosialisasikan ke Eropa dan Amerika Serikat daripada ke masyarakat Papua. (*Bintang Papua*)

1 Oktober

Kandasnya pengesahan RUU Otsus Plus oleh DPR RI dan selanjutnya dibawa oleh anggota DPR RI mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua Yan Mandenas. Yan mengharapkan agar Pemprov Papua dan tim asistensinya jangan dulu berkecil hati tetapi kembali mengevaluasi UU Otsus dan hasil audit oleh BPK RI sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (*Cepos*)

2 Oktober

Pembahasan RUU Pemerintah Otsus Papua yang sempat terhenti di Baleg DPR RI periode 2009-2014 bakal menjadi fokus perhatian

bagi anggota DPR RI dan DPD RI asal Papua yang baru dilantik di Gedung DPR RI. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Papua Willem Wandik. (*Cepos*)

3 Oktober

Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda memuji perjuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kelemen Tinal dalam memperjuangkan UU Otsus Plus. (*Bintang Papua*)

8 Oktober

Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua mendesak kepada pemerintah pusat terutama DPR RI yang baru agar segera mengesahkan RUU Otsus Plus yang saat ini sedang didorong oleh Pemprov Papua. (*Cepos*)

6 November

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Negara telah memberikan Otsus bagi Provinsi Papua melalui UU No 21 Tahun 2001. Untuk itu gubernur meminta kepada Negara untuk tidak memaksakan aturan nasional diterapkan di Papua. (*Cepos*)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi action dari penggunaan dana Otsus sebesar 80 persen untuk kabupaten/kota. (*Cepos*)

15 November

Gubernur Papua Lukas Enembe menilai jika Otonomi Khusus ditiadakan oleh pemerintah yang baru ini maka akan lebih baik lagi. Namun dengan catatan bahwa Papua harus diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri seluruh kekayaan alam yang ada untuk kemajuan Papua. Untuk itu, gubernur mengajak semua bupati dan wali kota bersatu, termasuk Pemprov Papua Barat untuk menghadapi kebijakan nasional yang tidak memahami Papua dan hal itu tidak boleh terjadi di Tanah Papua. (*Cepos*)

5. MAJELIS RAKYAT PAPUA & PAPUA BARAT

17 Januari

Anggota MRP Yunus Matius Murib di ruang kerjanya pada Kamis, 16 Januari 2014 menjelaskan MRP berhasil menetapkan dan mengesahkan logo, hymne dan mars dari lembaga kultur orang asli Papua serta mensahkan 31 Oktober sebagai hari budaya untuk tanah Papua. (*Bintang Papua*)

21 Januari

Ketua MRP Timotius Murib di Kantor DPR Papua pada Senin (20/1), mengatakan pihak MRP dan MRPB siap beradu argumen dengan pemerintah pusat terkait penyerahan Undang-Undang Pemerintahan Papua yang akan disahkan. (*Suluh Papua*)

27 Januari

Wakil Ketua MRPB Anike Sabami pada Sabtu, 25 Januari 2014 menegaskan kaum perempuan memiliki peluang besar untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif maupun menduduki jabatan struktural di dalam partai politik. Oleh karena itu diharapkan pada pemilihan legislatif kuota 30 persen perempuan bisa terpenuhi. Kaum laki-laki yang duduk di legislatif sama sekali tidak memperjuangkan hak-hak perempuan. (*Suluh Papua*)

16 Mei

Wakil MRP Hofni Simbiak dalam rapat kerja penyerahan laporan anyam noken kehidupan bersama koalisi Perempuan Papua pada Rabu, 14 Mei 2014 di Kantor MRP mengatakan MRP siap terlibat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. (*Suluh Papua*)

13 Oktober

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua Albert Bolang mengatakan saat ini Reperdasus 14 kursi belum mendapat

pertimbangan dan persetujuan dari MRP, selain itu belum tercatat dalam Lembaran Daerah. Maka tugas MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam RUU tersebut. *(Suluh Papua)*

6. PEMEKARAN WILAYAH

3 Januari

Ketua tim pemekaran Muyu Mandobo Martinus Turip di Merauke pada Kamis, 2 Januari 2014 mengatakan, Presiden SBY telah menandatangani amanat presiden tentang pembentukan daerah otonomi baru yakni pemekaran provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke, Muyu Mandobo, Muara Digoel dan Karobai. *(Suluh Papua & Cepas)*

6 Januari

Sekretaris Jenderal tim pemekaran Provinsi Papua Tengah Hironimus Taime mengatakan, setelah disetujuinya penandatanganan 65 pemekaran daerah baru oleh Presiden SBY maka secara langsung ibu kota Provinsi Papua Tengah tetap berada di Kabupaten Mimika. *(Suluh Papua)*

7 Januari

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw di Hotel Trevel pada Senin, 6 Januari 2014 mengatakan penyerahan amanat presiden (Ampres) oleh Agustina Basik-Basik anggota Komisi II DPR RI untuk pemekaran Grime Nawa menjadi hadiah tahun baru yang luar biasa dan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. *(Bintang Papua & Cepas)*

21 Januari

Wakil Bupati Boven Digoel Yesaya Merasi mengatakan, Pemda Boven Digoel mendukung pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo (MUMAN). Menurutya, pemekaran ini adalah solusi mengatasi keadaan terisolasinya daerah tersebut. *(Bintang Papua)*

23 Januari

Ketua DPRD Merauke Leonardus Mahuse di ruang kerjanya, mengatakan pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah dalam tahapan rencana undang-undang dan menjadi amanat presiden (Ampres). Selain itu ia mengharapkan bupati Merauke harus berinisiatif mengumpulkan para bupati dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi untuk mendukung terwujudnya Provinsi Papua Selatan. (*Suluh Papua*)

30 Januari

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wondama Bob Warinussy pada Rabu, 29 Januari 2014 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Wondama sangat mendukung dengan adanya usulan pemekaran Kuri Wamesa. Kalau hal ini bisa direalisasi menjadi DOB, maka menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemda Wondama yang mampu memekarkan wilayahnya. Menurut Bob Warinussy Pemda Wondama telah mengeluarkan rekomendasi mendukung usulan pemekaran Kabupaten Kuri Wamesa, yang saat ini tinggal menunggu dukungan dari Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, dan pemerintah pusat. (*Suluh Papua*)

6 Februari

Ketua DPRD Merauke Leonardus Mahuze pada penutupan sidang paripurna mengatakan pihaknya akan meminta bupati Merauke untuk segera mengeluarkan SK pembentukan tim asistensi pemekaran Kota Merauke. (*Suluh Papua*)

19 Februari

Anggota Komisi II DPR RI Agustina Basikbasik di Swissbel Hotel Jayapura pada Selasa, 18 Februari 2014 mengatakan dari 65 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia, Papua mendapatkan 33 DOB. Menurut Agustina, 33 DOB ini telah mengikuti tahapan seleksi. (*majalahselangkah.com*)

1 Oktober

Direktur Jenderal Otonomi Djohermansyah Djohan mengatakan 87 usulan daerah otonom baru (DOB) kelak akan diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang disahkan beberapa waktu lalu. Karena UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah tidak berlaku lagi. (*Bintang Papua*)

4 Oktober

Rencana penetapan UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, khususnya rencana pembentukan Kabupaten Grime Nawa masih menunggu kesiapan dari DPR-RI periode 2014-2019 yang baru dilantik pada 1 Oktober. Menurut Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, hal ini akan berdampak dengan tertundanya semua pemekaran daerah otonomi baru seluruh Indonesia. (*Cepos*)

3 November

Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang akan memprioritaskan pemekaran terutama pemekaran provinsi baru di Papua ditolak oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Selain itu Lukas juga menolak rencana transmigrasi ke Papua. (*Cepos*)

7 November

Koordinator tim pengaktifan pembentukan Provinsi Papua Tengah A.P Youw mengatakan bahwa rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai dengan didukung Surat Gubernur No. 125/803/SET tanggal 28 Maret 1999 tentang usulan pemekaran wilayah Provinsi Irian Jaya menjadi tiga wilayah, serta UU No.45 tahun 1999. (*Cepos*)

Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara DPR/MPR dan DPD RI di Jakarta. Dalam Pertemuan itu Lukas Enembe menyampaikan ketidaksetujuannya dengan adanya rencana pemekaran provinsi maupun program transmigrasi di

Papua. Sementara itu Oesman mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepadanya akan disampaikan dalam rapat MPR RI. (*Cepos*)

18 November

Wacana pemekaran provinsi maupun kabupaten di Provinsi Papua oleh Menteri Dalam Negeri RI ditanggapi dingin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas menegaskan bahwa pemekaran daerah otonom baru harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di UU No. 21 Tahun 2001. (*Cepos*)

2 Desember

Rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah di Papua harus merujuk pada kesepakatan Papua Bersatu yang merupakan pertemuan para tokoh Papua dan Papua Barat dengan pemerintah yang digagas Kaukus Papua di Parlemen RI pada 9 November 2012. Hal ini ditegaskan oleh politisi Papua Paskalis Kossay. (*Bintang Papua*)

7. KORUPSI

7 Januari

Sidang kedua kasus dugaan korupsi proyek pengadaan souvenir kulit buaya oleh mantan Bupati Merauke Jhon Gluba Gebze digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada Senin, 6 Januari 2014. Dalam kasus dugaan korupsi ini saksi mantan Sekda Merauke mengakui bahwa APBD sebesar Rp 18 miliar untuk pengadaan souvenir kulit buaya menyalahi aturan. (*Bintang Papua & Cepos*)

17 Januari

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua E.S. Maruli Hutagalung mengakui jika Kejati Papua masih kekurangan jaksa. Menurutnya, jumlah Jaksa yang hanya 20 orang tidak cukup untuk menangani kasus dugaan korupsi di Papua. (*Cepos*)

18 Januari

Sebanyak 39 anggota DPR Papua Barat dituntut dengan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan dakwaan selama 1,6 tahun. (*Cepos*)

21 Januari

Advokat Gustaf Kawer di Abepura pada Senin, 20 Januari 2014, menilai tuntutan hukum kasus korupsi di Papua sangat rendah, misalnya terdakwa 44 anggota DPR Papua Barat yang dituntut hukuman penjara 18 bulan. Ada dugaan sarat konspirasi politik, dimana aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi, Hakim dan pengacara) ikut bermain di balik kasus dugaan korupsi. Hal ini menyebabkan pemberantasan kasus korupsi tak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kasus dugaan korupsi adalah kasus luar biasa namun penanganannya tidak serius. Sedangkan kasus makar justru diseriusi oleh Jaksa, Polisi, Hakim dan pengacara. (*Suluh Papua*)

25 Januari

Mahasiswa Forum Peduli Kawasan Biak meminta BPK-RI untuk menindaklanjuti hasil temuan dugaan korupsi dari dana hibah di Dinas Sosial Kabupaten Biak senilai Rp 12 miliar yang tidak jelas sarasanya. (*Cepos*)

11 Februari

Ketua Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua Frenkie Son mengungkapkan, terdakwa Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil I DPR Papua Barat Robert Manuel Nauw dan mantan Sekda Papua Barat masing-masing divonis pidana 1,3 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan penjara. Hal ini terkait sidang putusan kasus dugaan korupsi APBD tahun 2010-2011 senilai Rp 22 miliar yang dilakukan oleh 44 anggota DPR Papua Barat di Pengadilan Tipikor Jayapura. (*Bintang Papua*)

14 Februari

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo pada Kamis, 13 Februari 2014, mengungkapkan penanganan kasus korupsi di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014. Kejaksaan Tinggi Papua mengklaim Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pada Februari tahun 2014 kasus korupsi yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan sekitar 60 lebih kasus. (*Papua Pos*)

1 April

Mantan bendahara pengeluaran sekretariat KPU kota jayapura inisial YW ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dugaan korupsi dana hibah yang terjadi di KPU pada tahun 2011 Sedangkan mantan Ketua KPU berinisial L telah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. (*Cepos*)

2 April

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Waropen yang melibatkan Bupati Waropen Yesaya Buney, Rabu (1/4), di Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura terungkap bahwa bupati tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan korupsi. Bupati hanya menjalankan tugasnya untuk mensukseskan Pilkada. Terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang menjelaskan keterlibatan bupati. Tidak ada yang mengakui terkait siapa yang mencairkan dana tersebut. (*Cepos*)

11 April

Terkait dengan dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Dogiyai, Kapolda Papua Yotje Mende pada Jumat, 10 April 2014, mengatakan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam penyelidikan sudah ditetapkan seorang pegawai Pemda Dogiyai inisial SK. Dugaan korupsi ini merugikan negara sebesar Rp 32 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Papua (BPKP) terdapat

33 kasus korupsi yang menyebabkan negara rugi Rp 49 miliar. Menurut Kepala BPKP Perwakilan Papua Ketut Suadnyana Merada pada Minggu, 12 April 2014, kasus penyalahgunaan dana hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Papua antara lain Jayapura, Biak Numfor, Waropen, Boven Digoel, Puncak, Merauke, Tolikara, Sarmi, Nabire, Yahukimo dan Asmat. (*Cepos & Kompas*)

16 April

Bupati Waropen Yesaya Buinei divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura pada Rabu, 15 April 2014. Bupati Yesaya tidak terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah APBD Kabupaten Waropen yang diperuntukan penyelenggaraan Pilkada Waropen 2010. (*Cepos & Suluh Papua*)

18 April

Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura, Papua belum mengeksekusi penahanan dua terpidana kasus korupsi Mathias Sarwa dan Jantje Lagu. Kedua orang ini sudah dijatuhkan sebagai terpidana pada 4 Maret lalu. Mathias adalah Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan Jantje adalah direktur keuangan. Mereka divonis lima tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan beras di Pegunungan Tengah pada 3 Desember 2009 bagi PNS. (*Kompas*)

3 Mei

Kejaksaan Tinggi Papua menahan satu tersangka dalam kasus pembangunan gedung MRPB berinisial DT yang menjabat sebagai ketua panitia lelang. DT ditahan karena tidak melakukan mekanisme lelang dan ia hanya melakukan penunjukan. Menurut Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Alexander Sinuraya kasus pembangunan gedung MRPB menelan kerugian negara sekitar Rp 2,4 miliar. (*Suluh Papua & Cepos*)

6-8 Mei

Bupati Meybrat Bernard Sagrim yang berstatus tersangka

kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan keuangan akan dipindahkan ke Rutan Manokwari karena sidangnya akan digelar di Pengadilan Tipikor Manokwari, Papua Barat. Ia dipindahkan karena berkas-berkas kasus ini telah dinyatakan lengkap (P21). Penahan dan pemindahan ini ditolak oleh para pendukung Bupati Bernard. Massa melakukan sejumlah tindakan anarkis dengan membakar sejumlah rumah warga. Selain itu sebanyak 12 pimpinan partai politik (Parpol) di Kabupaten Puncak meminta ke KPU Papua untuk segera mengembalikan suara ke masing-masing Parpol agar diatur secara internal Parpol. (*Suluh Papua, Cepos & Bintang Papua*)

Massa yang tidak puas dengan penahanan Bupati Maybrat Bernard Sagrim di Mapolda Papua pada Senin, 5 Mei 2014 terkait dugaan korupsi dana hibah mengamuk, membakar ban bekas dan memalang jalan di Kampung Tuso, Distrik Ayanmaru. Massa membakar satu unit rumah milik anggota DPRD Maybrat Habel Howay. Selain itu sebuah toko di Kampung Fratafen juga dibakar oleh massa. (*Cepos*)

10 Mei

Berdasarkan data hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap lima kasus di Papua Barat menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp 9,8 miliar. Kelima kasus yang dimaksudkan adalah kasus bantuan haji di Kabupaten Kaimana tahun 2011, kasus ketekoran kas Bappeda Kaimana 2013, kasus bantuan hibah perintis kemerdekaan Sorong tahun 2011, kasus pengadaan formulir dinas Dukcapil Kota Sorong tahun 2012 dan kasus sistem informasi Dinas Dukcapil Kota Sorong tahun 2012. (*Cepos*)

14 Mei

Kejaksanaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana block grand tahun anggaran 2012 untuk merenovasi 25 SD di Kabupaten Supiori. Diperkirakan dana yang dikorupsi

adalah Rp 10,2 miliar. Dua tersangka tersebut adalah seorang PNS dan pensiunan PNS. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejati Papua Maruli Hutagalung di Kota Jayapura pada Selasa, 13 Mei 2014. (*Suluh Papua & Cepas*)

16 Mei

Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari melakukan klarifikasi terkait perkara dugaan korupsi dana perjalanan wisata rohani untuk 50 orang senilai Rp 1,5 miliar. Kasus ini menyeret Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Teluk Wondama Agus Yulianto. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Manokwari Jhon Ilef, dalam APBD 2010 Teluk Wondama dianggarkan dana perjalanan wisata rohani ke Yerusalem sebesar Rp 3 miliar. Namun dialihkan untuk penanggulangan bencana tanpa prosedur persetujuan dewan. (*Suluh Papua*)

Kejaksaan Negeri Wamena telah menetapkan Kepala Kementerian Agama Yahukimo inisial DR sebagai tersangka kasus korupsi terkait penyewaan kendaraan operasional dan rumah dinas kepala kantor Kementerian Agama Yahukimo tahun 2009-2013. (*Suluh Papua*)

Kepala Kejati Papua Maruli Hutagalung menyesalkan sikap Pemda Papua yang masih menggunakan dan mempertahankan DW dan JW sebagai pejabat provinsi. Menurut Maruli Hutagalung, DW dan JW sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi di KPUD Lanny Jaya pada 2011 sebesar Rp 3 miliar. (*Bintang Papua*)

23 Mei

Dua pejabat Provinsi Papua Doren Wakerwa dan Jhon Way yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pada April dan Oktober 2011 oleh Kejati Papua tidak kuat karena keduanya dilantik dalam pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Kasus keduanya seakan hilang dan mengendap. Menurut Kepala

Kejati Papua Elieser Mauruli Hutagalung, Selasa (21/5), kasus DW dan JW akan diteruskan sampai pada proses hukum di pengadilan paling lama bulan Juli. (*Suluh Papua*)

19 Juni

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura AKBP Alfred Papare di Mapolresta Jayapura pada Rabu, 18 Juni 2014 telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana subsidi trayek bagi Perusahaan Damri Wilayah IV Jayapura senilai Rp 3,3 Miliar tahun anggaran 2012. (*Suluh Papua*)

17 September

Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi dana hibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai tahun 2012-2013 senilai Rp 32 miliar dengan memeriksa tujuh saksi. Hal ini disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kombes Pol. Sulistyio Pudjo Hartono. (*Cepos*)

23 September

Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan rekonstruksi talud abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor mengakui perbuatannya kepada Majelis Hakim Tipikor di hadapan Majelis Hakim Yesaya, banyak mengeluh soal perbuatannya. (*Suluh Papua*)

2 Oktober

Kejaksaan Tinggi Papua resmi menahan mantan Sekda Papua Barat Marten Rumadas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sarana prasarana Provinsi Papua Barat senilai Rp 78 miliar. Penetapan ini setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Papua. (*Cepos*)

3 Oktober

Terdakwa kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidrolik (PLTMH) sebesar Rp

5,3 miliar di Kampung Keniapa, Distrik Yatamo dan Kampung Ugidimi, Distrik Bibida Kabupaten Paniai dituntut pidana masing-masing 5 tahun dan 2 tahun penjara. (*Bintang Papua*)

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Weny Liyemantika Kepala Dinas PU Kabupaten Nabire dan Kontraktor Jeffry Ferdi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 22 miliar pada tahun 2011. (*Suluh Papua*)

Dua tersangka terkait kasus DPID di Dinas PU Kabupaten Nabire dan satu tersangka kasus pembangunan PLTMH di Pania telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kejati Papua E.S Maruli Hutagalung. (*Cepos*)

4 Oktober

Pihak Kejati Papua kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat senilai Rp 78 miliar. Tersangka yang ditahan berinisial RS, yang merupakan komisaris PT. Putra Papua Prakasa. Sebelumnya Kejati telah menahan mantan Sekda Provinsi Papua Barat ML. Rumada. (*Cepos*)

Kepolisian Sektor Jayapura Selatan meminta bantuan dua saksi ahli dari Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) guna mengusut dugaan penimbunan BBM jenis solar di Kompleks Blok F No. 22, Perumahan Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan. (*Cepos*)

7 Oktober

Bupati Waropen Yesaya Bunei yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah KPU Kabupaten Waropen tahun anggaran 2010 senilai Rp 3 miliar akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Serui dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati Serui. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

9 Oktober

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua tahun anggaran 2011. Kedua tersangka adalah Sugiarto selaku Pejabat Pembantu Komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan Irawan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. *(Suluh Papua)*

15 Oktober

Bupati Dogiyai Thomas Tigi memprotes atas niat Polda Papua mengusut dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Kabupaten Dogiyai tahun 2012-2013 senilai Rp 32 miliar dengan mengirim tim khusus ke Kabupaten Dogiyai yang dipimpin Kompol Jefri Siagian. *(Suluh Papua)*

11 November

Rumah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi berinisial BS, tersangka kasus dana Bansos Kabupaten Sarmi di kawasan Jalan Samudera Maya No 9 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara disita oleh penyidik Kejaksaan Agung RI pada Selasa, 11 November 2014. *(Cepos)*

Tim 16 Kabupaten Sarmi mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Bupati Sarmi Mesak Manibor menyusul ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan APBD Kabupaten Sarmi tahun 2012 sebesar Rp 4,5 miliar. *(Suluh Papua)*

13 November

Pihak penyidik Kejari Serui telah menetapkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah KPUD Waropen senilai Rp 3 miliar dengan tersangka Bupati Waropen Yesaya Bunei telah lengkap tahap II atau P2I sehingga rencananya tim penyidik Kejari akan

menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Kejati Papua pada 13 November 2014. (*Suluh Papua*)

17 November

Forum Pembela Demokrasi Papua (FPDP) mendesak Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende agar menelusuri proses penyelidikan perkara korupsi Beras Miskin (Raskin) Jayawijaya yang sudah ditangani pada satu tahun lalu oleh Polres Jayawijaya. Pasalnya menurut Ketua FPDP Yan Matuan kasus ini sudah diselidiki dan berhasil menetapkan tiga orang tersangka namun hingga saat ini berhenti. (*Cepos*)

18 November

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung RI Tony Spontana menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan Bupati Sarmi Mesak Manibor sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 4,5 miliar dana APBD Kabupaten Sarmi 2012-2013 sejak 17 Oktober. (*Suluh Papua*)

27 November

Tersangka kasus korupsi pengadaan baju batik di Pemerintah Kota Jayapura berinisial JB diperiksa selama lima jam di ruang Kepala Seksi Datun Kejari. Inisial JB diduga sebagai kunci terkuaknya kasus korupsi baju batik mencapai Rp 1,7 miliar. (*Cepos*)

28 November

Setelah melalui proses penyidikan yang panjang terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Waropen tahun 2010, Kejari Serui akhirnya menahan tersangka Bupati Waropen Yesaya Buinei di LP Kelas II A Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. (*Cepos*)

8. KESEJAHTERAAN UMUM

3 Januari

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Didik Kosbiato di Jayapura pada Kamis, 2 Januari 2014 mengatakan berdasarkan

data BPS persentase penduduk miskin selama enam bulan terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen sehingga menjadi 31,53 persen. Menurut tipe daerah penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2013 sebanyak 1,012,57 orang atau 40.72 persen. Sementara penduduk miskin yang hidup di perkotaan 45,41 ribu orang atau 5,22% persen. *(Suluh Papua)*

18 Januari

Pelaksana tugas harian Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen mengungkapkan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para PNS di lingkungan Pemprov Papua, pemerintah telah mengusulkan kenaikan uang lauk pauk menjadi 110 persen dari APBD 2014. *(Cepos)*

Puluhan pedagang di Kabupaten Mimika melakukan demonstrasi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, menuntut DPRD menindaklanjuti penarikan pajak liar yang dilakukan oleh pengelola Pasar Swadaya Masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka kecewa dengan pengelola pasar yang mengeluarkan surat edaran nomor 001/pengelola-pasar/TM/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013 yang mengharuskan pedagang pasar mulai tanggal 3 Januari 2014 akan dilakukan penagihan pajak/penagihan sewa ruko yang sudah disediakan oleh pengelola pasar. *(Suluh Papua)*

23 Januari

Pelaksana tugas harian Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Hanna Hikoyaby di ruang kerjanya pada Selasa, 21 Januari 2014 mengatakan, Pemda Kabupaten Jayapura pada tahun 2014 menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan. *(Suluh Papua)*

3 Februari

Koordinator Solpap Pdt. Dorotea Balubun pada Sabtu, 1 Februari 2014 meminta Perum Damri Provinsi Papua untuk mengerti hak-

hak mama-mama asli Papua. Ia mengatakan pihak Damri harus mengerti dan pindah tempat atau lokasi di mana akan dibangun pasar bagi mama-mama asli Papua. Menurutnya, pemerintah sudah menyediakan tempat baru bagi pihak Damri namun sampai saat ini pihak Damri tidak mau pindah. (*Suluh Papua*)

2 April

Pihak Pemda Lany Jaya memberikan dana bantuan dana gerbang mas hasrat Papua tahun 2015 senilai Rp 100 juta untuk pembangunan 200 unit rumah bagi masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Bupati Lany Jaya Befa Jigibalom, Selasa (31/3), di Kantor Gubernur Papua Jayapura. Menurut Befa, hal ini menindaklanjuti program pembangunan 13.000 unit rumah sesuai kebijakan gubernur dan wakil gubernur Papua melalui program gerbang mas hasrat Papua. (*Bintang Papua*)

7 April

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Papua Yan Ukago mengatakan, pembuatan desain pasar mama-mama Papua sudah diambil ahli pusat. Tim dari Jakarta sudah menyerahkan desain tersebut kepada Solpap. Menurut Yan, pihak PU Papua sudah membuat desain dan telah mengusulkannya berdasarkan nilai-nilai budaya Papua tetapi sudah diubah oleh pusat. (*Cepos*)

15 April

Mama-mama pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solpap melakukan aksi di Kantor DPR Papua pada Selasa, 14 April 2014. Mereka meminta kepada DPR Papua untuk membantu mereka menggantikan tenda-tenda tempat jualannya yang sudah mulai rusak di Pasar Sementara Mama-Mama Papua di Jln. Percetakan, Kota Jayapura. (*Bintang Papua*)

30 Juni

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar di Jayapura mengakui masih ada perusahaan atau

pengusaha yang belum membayar upah tenaga kerja sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk perusahaan yang belum membayar tenaga kerja sesuai dengan UMP tersebut, memang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua, dengan memberikan himbauan dan usulan penanggulangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. (*Cepos*)

2 Oktober

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Kadisnakerduk) Provinsi Papua Jan Piet Rawar mengungkapkan jika saat ini proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua sudah mulai dilakukan. Untuk menghitung UMP 2015 sekarang Dewan Pengupahan sedang melakukan survei ke beberapa kabupaten kota untuk memeriksa harga-harga dari 68 komponen perhitungan UMP. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

9. PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

10 Januari

Ketua KPU Papua Adam Ariso'i mengatakan ribuan logistik berupa kotak suara di Kota Jayapura hilang dari gudang penyimpanan. Akibatnya, KPU Kota Jayapura diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Adam menduga logistik tersebut dijual oleh pemilik gudang. (*Cepos & Bintang Papua*)

18 Januari

Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardine, di Jayapura pada Jumat, 17 Januari 2014 mengatakan, penyelenggara Pemilu yang paling banyak diberi sanksi pemberhentian adalah Papua. Indikatornya adalah putusan-putusan KPU yang tidak netral sehingga merugikan pihak yang lain. (*Cepos*)

23 Januari

Ketua Umum Sikat Papedalu Papua Aril Marini mengatakan, pelaksanaan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) Papua 2014

dinilai telah gagal dan syarat dengan kepentingan politik yang diindikasikan untuk mencari keuntungan pribadi para komisioner KPU Provinsi Papua. Menurut Aril, banyak kejanggalan yang ditemukan saat proses berlangsung. Prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. (*Bintang Papua*)

24 Januari

Pelaksana Tugas Harian Bupati Mimika Ausilius Yaouw menyampaikan, pelaksanaan putaran kedua pemilihan bupati (Pilbup) Mimika yang akan dilaksanakan pada 25 Januari 2014 ditunda karena anggaran yang disediakan pada putaran kedua senilai Rp 28 miliar belum diputuskan oleh DPRD Mimika dalam sidang paripurna. (*Bintang Papua & Cepos*)

3 Februari

Ketua KPU Papua Adam Arisoy kepada wartawan di Jayapura pada Senin, 3 Februari 2014 mengatakan keputusan terkait komisioner sudah final dan tidak bisa lagi diganggu gugat terkait pelantikan anggota KPU di 6 kabupaten di Papua. Enam KPU kabupaten yang dilantik antara lain KPU Kabupaten Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Paniai, Boven Digoel dan Diyai. Sementara tiga KPU yang hingga kini belum dilantik yakni Jayawijaya, Sarmi dan Biak. Pada saat pelantikan massa berunjuk rasa menuntut KPU Provinsi Papua untuk membatalkan SK pelantikan komisioner KPU Jayawijaya yang dinilai tidak mewakili masyarakat asli setempat. (*tabloidjubi.com*)

6 Februari

Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Jayawijaya (MPPD) di Abepura, Rabu (5/2), melakukan aksi demonstrasi di KPU Papua. Mereka meminta KPU Papua untuk mengakomodir dua komisioner KPUD anak asli Jayawijaya. Menurut mereka, jika tidak diakomodir maka mereka akan memboikot Pemilu di kabupaten tersebut. (*Suluh Papua*)

17 Februari

Ketua KPU Papua Adam Arisoy di Kantor Gubernur Dok II Jayapura pada Senin, 17 Februari 2014 mengatakan, KPU Papua akan menyusun jadwal kampanye 12 partai politik untuk tingkat Provinsi Papua. Rencana jadwal kampanye tersebut akan disusun pada 24 Februari. Sementara itu KPU Papua telah mengajukan anggaran Pileg dan Pilpres kepada Pemprov Papua sebesar Rp 25 miliar. Pada saat ini dana yang sudah diterima oleh KPU Papua sebesar Rp 2,7 miliar. Dana tersebut sudah digunakan untuk membiayai kegiatan Bimtek KPU Papua pada 17 Januari 2014. (*papuapos.com*)

19 Februari

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen Christian Zebua, Rabu (19/2), mengatakan, tak akan ada pengerahan pasukan ke sejumlah daerah yang dianggap rawan di Papua menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya akan mengerahkan 1/3 dari sekitar 15000 personel TNI di Papua atau sekitar 5000 anggota. (*tabloidjubi.com*)

2 Mei

Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Pusat memberikan tenggang waktu kepada KPU Papua untuk melaporkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi sampai tanggal 6 Mei. Menurut salah satu anggota KPU Papua Musa Sombuk, alasan pengunduran waktu disebabkan oleh KPU kabupaten dan kota belum semuanya menyerahkan hasil rekapitulasi suara. (*Cepos*)

Lima Komisioner KPUD Boven Digoel akan diseret ke jalur hukum karena telah melakukan tiga pelanggaran administrasi dan pidana terjadinya perubahan berita acara dari hasil pleno KPUD ke tingkat KPU provinsi. Sedangkan di Pegunungan Bintang Ketua DPD Partai Golkar Agustinus Uropmabin mengakui adanya kecurangan dalam Pileg yang dilakukan oleh Parpol dan KPUD. (*Cepos*)

Rapat terakhir pleno KPUD Kabupaten Jayapura pada Kamis, 1 Mei 2014 diwarnai dengan aksi protes dari tujuh saksi Parpol. Alasannya, mereka menilai KPUD dan Panwaslu Kabupaten Jayapura tidak menghormati keputusan yang sudah disepakati. Kesepakatan itu adalah KPUD diminta untuk melakukan penghitungan ulang pada PPD Sentani karena terjadi penggelembungan suara. (*Cepos*)

3 Mei

Koalisi 10 Parpol di Kabupaten Dogiyai tidak puas dengan hasil Pileg 9 April. Ada tiga distrik yang dinilai adanya kecurangan penggelembungan suara yakni Distrik Mapia Barat, Piyaye dan Sugika Selatan. Menurut Ketua Koalisi 10 Parpol Dogiyai Yulianus Kegiye, Jumat (2/5), pihaknya menuntut ulang penghitungan suara mulai dari PPS, TPS dan PPD di tiga distrik tersebut. (*Cepos*)

5 & 6 Mei

Rapat pleno rekapitulasi suara Pileg yang digelar oleh KPU Provinsi di Hotel Aston Jayapura pada Sabtu, 3 Mei 2014 berlangsung ricuh. Hal ini disebabkan ketika KPUD Kepulauan Yapen melaporkan rekapitulasi suaranya. Salah seorang Caleg dari Hanura Yan Mandenas mengajukan protes karena banyak suaranya hilang. Menurut Yan, ada permainan kotor yang dilakukan oleh KPUD Kepulauan Yapen. Selain itu di Kabupaten Intan Jaya, ada 8 partai akan mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Kabupaten Puncak salah satu Caleg PAN Yulius Murib meminta agar pleno suara dihentikan dulu karena banyak suaranya hilang. Pihak kepolisian Intan Jaya membantu para komisioner KPUD Intan Jaya menggunakan helikopter karena bandara di Sugapa telah dipalang oleh masyarakat karena persoalan perhitungan suara Pileg. (*Cepos*)

Perhitungan suara pada Pileg masih bermasalah di beberapa daerah di Papua. Menurut data dari Bawaslu Papua menyatakan hasil rekapitulasi suara KPUD Yahukimo bermasalah karena jumlah suara tidak akurat dan belum ditandatangani seluruh saksi di

tingkat kabupaten. Menurut Ketua KPUD Yahukimo Noce Wonda, ada belasan ribu jumlah suara yang hilang. (*Suluh Papua*)

Rapat paripurna DPRD Boven Digoel terkait penetapan wakil bupati Boven Digoel pada Senin, 28 April 2014 dinilai cacat oleh Ketua DPRD Boven Digoel Ayub Santi, karena hanya dihadiri enam anggota DPRD, anggota yang lainnya masih ada di luar Boven Digoel. Pernyataan ini ditanggapi Wakil Ketua DPRD Boven Digoel Edward Haurissa. Menurut Edward, tidak cacat hukum karena sidang ini berdasarkan SK Presiden melalui Mendagri no 131/91/4539/2013 tentang pemberhentian bupati Boven Digoel. Selain itu para anggota DPRD yang pergi keluar tidak memberitahukan kepada Pemda dan para anggota DPRD yang lainnya, jadwal sidang ini sudah diberitahukan kepada ketua DPRD. (*Cepos*)

6 Mei

Badan Pengawas Pemilu Papua secara resmi melaporkan Ketua KPUD Sarmi Yosef Twenti dan satu anggotanya Odi Aweitouw ke Mapolda Papua pada Sabtu, 3 Mei 2014. Kedua orang ini dilaporkan karena diduga membawa lari surat suara hasil rekapitulasi dari enam distrik. (*Suluh Papua*)

Di Kabupaten Puncak Pileg berlangsung sangat kacau. Menurut seorang calon DP Papua Dapil IV Elisabeth Tebai, ada praktik jual beli suara dan intervensi pejabat setempat di dalam Pileg tersebut. Semua penyelenggara Pileg bekerja sama demi kepentingan mereka. (*Suluh Papua*)

Masyarakat Intan Jaya melakukan aksi pemalangan di lapangan terbang Sugapa, Intan Jaya. Alasannya untuk mencegah komisioner KPUD Intan Jaya agar tak keluar dari Intan Jaya. Hal ini mengakibatkan pihak kepolisian membantu para komisioner untuk terbang keluar dari Intan Jaya menggunakan helikopter. Alasan pemalangan karena masyarakat tidak terima dengan calon

legislatif (Caleg) yang tidak lolos dalam Pileg 9 April. (*Cepos*)

7 Mei

Komisi Pemilihan Umum menunda pengesahan rekapitulasi hasil perhitungan suara DPR RI dari Papua Barat. Hal ini disebabkan, terdapat kejanggalan angka perolehan suara partai calon anggota legislatif. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu Nasrulah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Gedung KPU pada Selasa, 6 Mei 2014. (*Suluh Papua*)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sejumlah perkara Pileg termasuk di Kabupaten Sarmi. Menurut salah seorang anggota DKPP Santo Gotia pada Selasa (6/5), dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sejumlah perkara Pemilu termasuk di Kabupate Sarmi, Papua. Pihaknya sudah membentuk tim pengelaran perkara Pemilu yang terdiri dari DKKP, Bawaslu dan KPU Pusat. (*Bintang Papua*)

Badan Pengawas Pemilu Papua menolak hasil rekapitulasi suara Pileg untuk DPR Papua, DPR RI, DPD yang dibacakan oleh KPUD Mimika di Jayapura pada Sabtu, 3 Mei 2014. Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika Agustinus Roya, penolakan Bawaslu Papua disebabkan adanya keberatan atau penolakan dari saksi-saksi Parpol. (*Bintang Papua*)

Masyarakat yang tergabung dalam Peduli Pemilu Bersih di Kota Jayapura melakukan aksi demo ke Kantor Bawaslu Papua, Selasa (6/5). Mereka meminta agar Bawaslu menindak tegas pelaku pelanggaran pengelembungan suara yang terjadi di Papua. (*Cepos*)

Ketua DPR Papua Deerd Tabuni meminta kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk bertanggung jawab terhadap Pileg yang berlangsung buruk. Kalau tidak, pihak DPR Papua akan menuntut KPU. (*Cepos*)

Massa yang tergabung dalam Peduli Pemilu Bersih di Kota

Jayapura melakukan aksi di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Selasa (6/5). Mereka meminta agar pihak Bawaslu menindak secara tegas pelaku pengelembungan suara pada Pileg. (*Cepos*)

8 Mei

Massa Perumnas II Waena, Jayapura melakukan pemalangan jalan alternatif Waena – Kota Jayapura. Alasannya, suara kandidat DPR yang mereka pilih hilang. Sedangkan di Kabupaten Dogiyai, tiga calon DPR menuding Bupati Dogiyai Thomas Tigi menggelembungkan suara untuk memenangkan calon tertentu. Hal ini dikatakan oleh salah satu anggota DPR Papua Felix Magai pada Rabu, 7 Mei 2014. (*Suluh Papua*)

Hasil rekapitulasi suara DPR RI Dapil Papua pada Rabu, 7 Mei 2014 mendapat penolakan dari saksi sejumlah Parpol dengan tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota. Dari 12 saksi Parpol yang hadir hanya saksi PKS yang bersedia menandatangani sertifikat tersebut. Meskipun ditolak komisioner KPU tetap mengesahkan hasil perhitungan suara tersebut. (*Bintang Papua & Cepos*)

Ketua Bawaslu Papua Robert Horik di Jayapura pada Rabu, 7 Mei 2014 mengatakan, hampir semua saksi Caleg dan Parpol dari kabupaten/kota mengadukan keberatan terhadap rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Menurut Robert, rekapitulasi suara dari KPUD Intan Jaya, Paniai, Dogiai, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Kepulauan Yapen dan Sarmi merupakan hasil rekapan yang paling buruk. (*Bintang Papua*)

Persoalan pengelembungan suara Pileg juga terjadi di Kabupaten Tolikara. Salah satu Caleg Elimer Enembe dari Partai Demokrat untuk pemilihan DPR Papua, Jayapura, Rabu (7/5), mengatakan, proses Pileg di Kabupaten Tolikara tidak berjalan dengan baik. Begitu banyak terjadi kecurangan di dalam Pileg yang dilakukan oleh PPD dan KPUD Kabupaten Tolikara. (*Bintang Papua*)

Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya Dino Wonda mengatakan tidak ada kecurangan pada proses Pileg 9 April yang berlangsung di Puncak Jaya. Menurut Dino, semua prosesnya berjalan lancar. *(Cepos)*

9 Mei

Kepolisian Daerah Papua mendapat bantuan dua kompi Brimob Kelapa II Jakarta untuk memperkuat tiga kabupaten yang dianggap rawan konflik pasca penetapan pleno KPU. Menurut Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, dua kompi personel Brimob Kelapa II akan ditempatkan di tiga kabupaten yang masih dianggap rawan. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nduga, Mambramo Tengah dan Lanny Jaya. *(Suluh Papua)*

Massa yang mengatasnamakan Peduli Demokrasi Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi di Kantor KPUD Jayawijaya, Kamis (8/5). Mereka menyampaikan persoalan yang terjadi dalam Pileg seperti ada suara beberapa Caleg dipangkas. *(Suluh Papua)*

Mahasiswa dan pemuda Kabupaten Intan Jaya menggelar aksi demo damai di Kantor Bawaslu Papua, Jayapura, Kamis (8/4). Mereka menolak hasil KPUD Intan Jaya karena dinilai banyak melakukan pelanggaran seperti penggelembungan suara terhadap kandidat tertentu. Aksi mereka ini tidak ditanggapi oleh Bawaslu karena semua anggota Bawaslu sudah berada di Jakarta mendampingi KPU Papua dalam rekapitulasi tingkat nasional. *(Cepos)*

10 Mei

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPUD Sarmi Yosep Twenty dan anggota KPUD Sarmi Odhy Demetouw. Keputusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada Jumat, 9 Mei 2014 di Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh ketua majelis Jimly Asshiddie. *(Cepos)*

Masyarakat di Kabupaten Keerom melakukan aksi demo ke Kantor KPUD Keerom pada Jumat, 9 Mei 2014. Mereka menuntut KPUD Keerom bertanggung jawab terhadap suara yang hilang dalam Pileg 9 April. (*Cepos*)

13 Mei

Pihak Polres Merauke menurunkan 150 personil untuk mengamankan rapat pleno penetapan kursi DPRD Merauke oleh KPUD Merauke pada Selasa, 13 Mei 2014. (*Suluh Papua*)

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Keerom akhirnya menetapkan 20 Caleg terpilih dalam Pileg 9 April di Ruang Sidang DPRD Keerom. Rapat pleno terbuka ini dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Keerom Bonefasius Bao. Hal yang sama juga terjadi di KPUD Kabupaten Supiori. Pihak KPUD Supiori menetapkan 20 orang Caleg terpilih. Rapat pleno ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Supiori. (*Cepos*)

14 Mei

Para anggota Caleg di Kabupaten Supiori yang tidak tembus dalam Pileg melakukan aksi protes ketika dalam pleno terbuka penetapan suara partai politik dan penetapan calon terpilih di Aula Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori. (*Suluh Papua*)

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pemilu Damai melakukan aksi demo damai ke Kantor KPU Papua pada Selasa, 13 Mei 2014. Mereka meminta kepada KPU untuk mengembalikan jumlah suara milik salah satu Caleg Letinus Yikwa yang hilang. (*Suluh Papua & Cepos*)

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayapura menetapkan 25 orang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014 – 2019 yang diikuti oleh 12 partai politik. Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Jayapura Hannock Mariai

di Hotel Sentani pada 13 Mei 2014. (*Suluh Papua & Cepos*)

16 Mei

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jayapura menetapkan 40 anggota DPRD yang terpilih di Hotel Matoa pada Rabu, 14 Mei 2014 dini hari. Selain itu KPU Papua menetapkan 55 Caleg yang terpilih menjadi anggota DPR Papua dalam rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Papua, Rabu (14/5). Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua KPU Papua Adam Ariso dan Anggota KPU Papua: Beatrix Wanane, Zadrak Nawipa, Tarwinto, Sombuk Musa Yosep. (*Bintang Papua*)

17 Mei

Para Caleg yang berasal dari Distrik Angkaisera dan Parpol di Kabupaten Kepulauan Yapen mendesak agar sidang sengketa Pileg di Pengadilan Serui segera dilaksanakan. Massa melakukan long march ke Kantor KPU Yapen. Menurut mereka, sidang sengketa Pileg sebaiknya dilakukan di Serui dari pada dilakukan di MK Jakarta. (*Suluh Papua*)

Panitia Pengawas Pemili Kabupaten Mimika menyatakan tidak mengakui keputusan KPU Provinsi Papua dalam pleno di Jayapura. (*Suluh Papua*)

20 Mei

Ketua DPRD Intan Jaya Irenius Sondegau melaporkan ketua KPUD dan bupati Intan Jaya atas dugaan penghilangan suara pada Pileg 9 April. Menurut Irenius, hilangnya suara dari 8 partai politik di Intan Jaya akibat campur tangan dari bupati dan ketua KPUD. Secara terang-terangan mereka mengambil suara dari 8 Parpol dan memberikannya kepada 4 Parpol lainnya seperti PAN, Demokrat, PPP dan Hanura untuk dijadikan pemenang dalam Pileg tersebut. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

Di Kabupaten Tolikara pada Sabtu, 17 Mei 2014 massa membakar Kantor Perindagkop Tolikara karena kecewa terhadap proses Pileg

9 April. Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Tolikara Beni Kogoya, massa kecewa dengan proses Pileg dan pleno rekapitulasi perolehan suara pada 22 April dan penetapan Caleg pada 17 Mei 2014. (*Bintang Papua*)

21 Mei

Komisi Pemilihan Umum Papua akan menonaktifkan seluruh komisioner KPUD di 13 kabupaten. Alasan dinonaktifkan adalah belum menggelar pleno penetapan kursi di DPRD wilayahnya. Berdasarkan data KPU Papua 13 kabupaten yang belum menggelar penetapan suara adalah Kabupaten Sarmi, Waropen, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Nduga, Boven Diigoel dan Kepulauan Yapen. Menurut Ketua KPU Papua Adam Arisoy, pihaknya telah memberikan peringatan dua kali lewat surat peringatan untuk mempercepat pleno penetapan suara. (*Suluh Papua*)

28 Mei

Pihak Bawaslu Papua menerima laporan dari masyarakat bahwa ada tiga bupati diduga melakukan intervensi terhadap hasil Pileg 9 April. Ketiga bupati tersebut adalah Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Toni Tesar dan Bupati Kabupaten Intan Jaya Natalis Tabuni. Walaupun demikian ada reaksi dari Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar terkait berita tersebut. Bupati Toni tidak setuju dan tidak menerima pernyataan tersebut. Menurut Toni, yang terjadi di Kepulauan Yapen adalah ketika pengumuman hasil suara semua KPUD lari meninggalkan Serui dan hasilnya diumumkan melalui RRI. (*Suluh Papua*)

Warga tiga distrik di Kabupaten Nduga melakukan pemalangan lapangan terbang di Keneyam, Nduga, pada Senin, 26 Mei 2014. Alasan memalangan adalah penetapan Caleg Nduga dinilai tidak sesuai dengan hasil perolehan suara. Massa menduga Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan lima anggota KPUD Nduga memanipulasi suara caleg Partai Bulan Bintang Zakarias Yarinap sebanyak 4.274 suara. (*Suluh Papua*)

30 Mei

Forum Peduli Demokrasi se-Pegunungan Tengah Papua (FPDPTP) mengancam akan memboikot Pilpres kalau tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah. Mereka meminta agar Pileg 9 April di lima kabupaten dilakukan ulang. Mereka menilai Pileg yang dilaksanakan banyak terjadi pelanggaran. Hal ini dikatakan oleh Koordinator FPDPTP Yan Matuan ketika menyampaikan orasinya di Kantor Bawaslu Papua pada Rabu, 28 Mei 2014. (*Suluh Papua*)

Di Wamena maraknya terjadi pemalangan fasilitas umum oleh Caleg yang tidak lolos dalam Pileg 9 April. Seperti pemalangan jalan raya, perusakan jembatan dan pemalangan PLN. Menanggapi situasi ini Sekda Kabupaten Jayawijaya Yohanis Walilo meminta agar tidak melakukan pemalangan fasilitas umum. (*Suluh Papua*)

15 September

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy, mengatakan sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan lima anggota KPUD Kabupaten Dogiyai karena terbukti melanggar kode etik. (*Bintang Papua*)

18 September

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melakukan konsultasi ke KPU Pusat terkait dengan rencana pelaksanaan Pilkada secara serentak di beberapa kabupaten Provinsi Papua. Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan sebanyak 22 Kabupaten di Papua akan melaksanakan pemilihan kepala daerahnya pada tahun 2015 dan 2016. (*Suluh Papua*)

4 Oktober

Para Ondoafi asal Port Numbay secara tegas mengharapkan agar kursi ketua DPRD Kota Jayapura periode 2014-2019 harus dipimpin oleh figur asal Port Numbay. Hal ini ditegaskan oleh Ondofolo Yoka Ismael Mebri di Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. (*Cepos*)

7 Oktober

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengakui pihaknya perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur pemilihan secara langsung. Penyesuaian peraturan perlu dilakukan. (*Bintang Papua*)

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa proses pemilihan umum di Papua lebih baik melalui jalur DPRD. Artinya Anggota dewan yang akan memilih pemimpin di Provinsi Papua. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

10 Oktober

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 se-Pegunungan Tengah Papua melakukan aksi di Kantor Gubernur Papua (9/10). Massa menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe agar tidak mengeluarkan SK Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten se-Pegunungan Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Demo Oktovianus Elosa. (*Bintang Papua*)

15 Oktober

Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Keerom secara resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Ruang Sidang DPRD Keerom pada 14 Oktober 2014. (*Bintang Papua*)

Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat mendukung proses seleksi 11 Anggota DPR Papua Barat yang dilakukan oleh Kesbangpol dan panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemprov Papua Barat. (*Bintang Papua*)

24 November

Sebanyak kurang lebih 17 Komisioner KPUD dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua diberhentikan oleh DKPP

karena terbukti tidak teliti dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu baik dalam Pileg maupun Pilpres, seperti kesalahan prosedur dan mengutamakan kepentingan penguasa dan elit politik. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Musa Sombuk. (*Suluh Papua*)

Bab 2

RUANG EKSPRESI DAN KEBEBASAN WARGA

1. KEBEBASAN WARGA DAN ASPIRASI POLITIK

9 Januari

Pengadilan Vanimo telah memerintahkan Kepolisian Vanimo untuk menangkap Kepala Rumah Sakit Vanimo dr. Stela Jimmy. Dokter ini ditangkap karena telah melawan perintah pengadilan dalam penyelidikan kematian Danny Kogoya. Dokter Stella ditahan karena mengeluarkan surat atas nama rumah sakit yang menunjuk dokter lain untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya. Pengadilan Vanimo sudah memastikan bahwa Dany Kogoya meninggal karena dibunuh. (*Papua Pos*)

10 Januari

Pelaksana tugas Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di ruang kerjanya pada Kamis, 9 Januari 2014 mengatakan, penembakan yang tidak kunjung henti di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya diduga bukan murni aktivitas TPN/OPM. Namun ada dugaan ada keterlibatan dan permainan intelijen. Persoalan yang selalu terjadi ini karena kelalaian TNI dan Polri atau bisa saja ada permainan intelijen. (*Suluh Papua*)

13 Januari

Kehadiran Menteri Luar Negeri Negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) di Provinsi Papua, ditanggapi oleh puluhan aktivis masyarakat sipil dan masyarakat adat Papua. Massa melakukan aksi demo di DPR Papua pada Senin, 13 Januari 2014. Sebanyak 46 orang ditangkap oleh Polres Kota Jayapura dengan alasan tidak mengantongi ijin saat melakukan demonstrasi di DPR Papua. (*Bintang Papua*)

Wakil Kepolisian Daerah Papua Paulus Waterpauw mengatakan tidak ada penangkapan terhadap para aktivis. Mereka hanya diamankan di Mapolresta Jayapura untuk dimintai keterangan. Anggota Komisi E DPR Papua Kenius Kogoya sangat menyayangkan aksi penangkapan sejumlah aktivis. Menurutnya polisi tidak menghargai orang Papua, karena tidak semestinya polisi menangkap orang Papua yang menyampaikan aspirasi di gedung DPR Papua. Sedangkan Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistiyo Pudjo mengatakan aktivis yang ditangkap tidak mencapai 40 orang. (*Suluh Papua, Bintang Papua & Cepos*)

15 Januari

Setelah menerima kedatangan delegasi para Menlu Melanesian Spearhead Group (MSG), Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura pada Senin, 13 Januari 2014 meminta masyarakat adat seluruh Tanah Papua untuk melupakan masa lalu. Kalau ada pelanggaran HAM dan kini kita tata kembali demi masa depan dan

kemajuan rakyat Papua. Di masa orde baru banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, akan tetapi sejarah sudah mencatat dan reformasi telah bergulir. (*Papua Pos, Cepos dan Bintang Papua*)

16 Januari

Pimpinan TPN-OPM Victoria Perbatasan RI-PNG Wilayah Keerom Lambert Pekikir di markasnya pada Rabu, 15 Januari 2014 mengatakan Pemerintah Indonesia harus membuka ruang untuk membicarakan aneka masalah sosial politik, termasuk pelanggaran HAM di Papua. Harus ada dialog dengan masyarakat adat Papua. Dengan itu, suara masyarakat akar rumput bangsa Papua bisa didengar duta MSG. Bukan mendengarkan omongan pemerintah atau sisi baiknya saja. Kelihatan delegasi MSG ini datang di bawah tekanan, OPM minta buka ruang demokrasi. Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai mengatakan kalau kunjungan MSG sebagai kunjungan kenegaraan seharusnya DPR Papua dan MRP dilibatkan dalam agenda kunjungan tersebut. (*Suluh Papua*)

20 Januari

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Kristian Warinussy mengatakan dirinya menolak secara tegas pernyataan Gubernur Lukas Enembe tentang rakyat Papua untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu dengan alasan kini sudah ada reformasi di Indonesia. Yan mengungkapkan, rakyat Papua jangan melupakan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. (*Bintang Papua*)

23 Januari

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di Hotel Aston Jayapura pada Rabu, 22 Januari 2014 mengatakan selama dirinya menjabat sebagai panglima ABRI tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh tanah Papua. (*Suluh Papua*)

24 Januari

Komisioner Komnas HAM RI Natalis Pigay mengaku kaget dengan pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto terkait

tidak ada pelanggaran HAM semasa jabatannya sebagai Panglima ABRI. Lebih lanjut Natalis mengatakan, sewaktu Wiranto menjadi Panglima ABRI terjadi pelanggaran HAM dan belum diselesaikan di antaranya kasus Wasior, Wamena, Abepura Berdarah dan pengibaran bendera di Tower Biak. (*Suluh Papua*)

30 Januari

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpau mengatakan dua dokter Australia kembali melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya pada Rabu, 29 Januari 2014. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kematian Danny. (*Cepos*)

3 Februari

Kontak senjata terjadi lagi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Kasawa, Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen pada Sabtu, 1 Februari 2014, kontak senjata antara TPN/OPM dengan TNI/Polri. Kejadian ini mengakibatkan Yosua Arumpayai (yang diduga anggota OPM) tewas tertembak. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Sulistio Pudjo, kontak senjata ini terjadi pada pukul 10.30 WIT ketika aparat gabungan TNI Polri melakukan operasi menggagalkan aktivitas bersenjata kelompok bersenjata pimpinan Fernando Warobai. (*Suluh Papua & tabloidjubi.com*)

6 Februari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Tito Karnavian mengakui di seluruh tanah Papua ada beberapa kelompok yang berjuang untuk merdeka. Mereka adalah kelompok Goliat Tabuni di Puncak Jaya dengan jaringannya Leka Telenggen, Militer Murib, Teny Kwalik, Ayun Yonker. Kelompok Purom Okima Wenda di Puncak Jaya dengan jaringannya Ani Wanimbo. Kelompok Jhon Yogy di Kabupaten Paniai, namun kelompok ini ada banyak yang mati karena penyakit HIV/AIDS. Kelompok Hans Richard Weni di Depapre (WPNC SL) yang memiliki anggota Tianus Sato, David Darko di Demta, Kosmas Makory di Mamberamo Raya, Rudy

Makatori dan Dey Imbery di Waropen. Kelompok Lamber Pekikir di Kabupaten Keerom. (*Bintang Papua*)

19 September

Amnesty Internasional mengkhawatirkan keselamatan Pengacara HAM Papua Anum siregar yang diserang orang tak dikenal usai mempraperadilan Polres Jayawijaya atas dugaan salah prosedur dalam penangkapan dan penahanan Areki Wanimbo, Kepala Dewan Adat Lani Jaya. Untuk itu pemerintah terutama kepolisian harus memberikan jaminan keamanan bagi setiap pengacara HAM di Papua. Amesty mendesak Pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada setiap pembela HAM Papua. (*Bintang Papua*)

22 September

Massa yang tergabung dalam Nasional Papua Solidaritas (Napas), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua serta Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) meminta aparat Polda Papua untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap para pembela Hak Asasi Manusia di Papua. (*Cepos*)

1 Oktober

Ketua Badan Pengurus Sinode Gereja Kingmi Papua Pdt. Benny Giay meminta agar pihak PTUN mencabut laporan pidana ke polisi terhadap Advokat HAM Gustaf Kawer. Hal ini disampaikan ketika melakukan audiensi dengan pihak PTUN Jayapura yang diwakili oleh Ketua PTUN Kasim, Wakil Ketua PTUN Jayapura Imanuel Mauw dan Humas PTUN Jayapura Firman serta staf PTUN Jayapura Doni Poja di kantor PTUN Jayapura. (*Bintang Papua*)

7 Oktober

Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lany Jaya menyatakan sikap siap melakukan perlawanan secara fisik terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) jika kelompok ini kembali melakukan

aksinya terhadap masyarakat maupun terhadap aparat keamanan. Pernyataan sikap ini ditandatangani bersama. (*Bintang Papua*)

8 Oktober

Sekretaris Solpap Robert Jitmau berharap anggota DPRD Kota Jayapura yang baru dilantik mampu mendorong terbentuknya Perda untuk memproteksi barang-barang khas Papua, seperti sagu, pinang dan pernak-pernik khas Kota Jayapura sehingga tidak sembarang orang menjual, namun dikhususkan bagi pedagang asli Port Numbay atau Pedagang asli Papua. (*Cepos*)

9 Oktober

Puluhan warga mendatangi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menuntut agar Pdt. Darius Kogoya yang terjerat kasus makar dibebaskan dari penjara karena masa hukumannya telah berakhir. (*Cepos*)

14 Oktober

Sedikitnya 17 anggota KNPB melakukan aksi tutup mulut dengan kain warna hitam, terpaksa diamankan aparat. Selain menangkap 17 orang tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah alat kelengkapan pendemo dan bendera KNPB. Aksi demonstrasi ini menuntut pembebasan dua wartawan Perancis Thomas Charles Dansois (40) dan Lauise Marie Valentine Baurrat (29) yang ditangkap oleh Polda Papua pada 7 Agustus 2014. (*Bintang Papua & Cepos*)

Puluhan Aktivis KNPB Merauke diamankan kepolisian Merauke terkait aksi long march. Mereka menuntut referendum dan pembebasan dua jurnalis asing Thomas Dandois dan Valentin Bourat yang ditahan di Imigrasi Papua terkait dengan liputannya di Kabupaten Lani Jaya. Menurut AKBP Sri Satyatama puluhan aktivis diamankan karena kegiatan tersebut tanpa mengatongi izin dari pihak kepolisian. (*Suluh Papua*)

21 November

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende memerintahkan kepada para Kapolres di wilayah Papua memupun Papua Barat agar membubarkan demonstrasi yang terkait dengan peringatan 1 Desember atau yang dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Papua. (*Cepos*)

22 November

Salah seorang anggota dari 11 anggota KNPB yang ditangkap oleh Polres Nabire bernama David Pigay ketahuan membawa amunisi berkaliber 5,56 dalam bentrok antara pendemo dengan aparat kepolisian pada 20 November 2014. Dalam bentrok tersebut ada dua korban terkena peluru karet dan dirawat di RSUD Paniai. (*Cepos*)

25 November

Aparat Kepolisian akhirnya menetapkan empat anggota KNPB sebagai tersangka dan semuanya kini mendekam di tahanan Polres Nabire. Empat orang ini merupakan bagian dari 11 orang yang diamankan oleh Polres Nabire karena melakukan demo anarkis di terminal Moenamani, Distrik Kamo, Kabupaten Dogiyai. (*Cepos*)

Ratusan Mahasiswa dan sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi se-Kota Jayapura menggelar demo di halaman kantor DPRD agar segera menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan bahan bakar minyak. (*Cepos & Suluh Papua*)

27 November

Wakil Bupati Jayapura Roberth Djoenso menghimbau kepada aparat keamanan di Papua khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura untuk tidak berlebihan dalam menyikapi peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua. Sebab jika disikapi berlebihan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (*Cepos*)

28 November

Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah perbatasan PNG-RI (Victoria) Lambert Pekikir meminta kepada seluruh pertahanan komando daerah bawahannya untuk tidak mengibarkan Bintang Kejora dan bunyi-bunyian senjata pada perayaan HUT OPM 1 Desember. (*Cepos*)

29 November

Tujuh wilayah Polres di Papua diminta siaga dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2014. (*Cepos*)

1 Desember

Dalam rangka perayaan 1 Desember 2014, Polda Papua secara khusus memonitor setiap pergerakan dari KNPB dan kelompok lain seperti KKB. Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (*Cepos*)

3 Desember

Direktur Baptis Voice Papua Matius Murib di Hotel Aston pada Kamis, 2 Januari 2014 mengungkapkan penanganan persoalan HAM di Papua masih sekedar wacana. Menurutnya, jika Pemprov Papua tak punya kemauan politik untuk merumuskan Perdasus tentang kelembagaan HAM, maka penanganan HAM di Papua masih terus menurun atau sekedar wacana. (*Bintang Papua*)

Bab 3

SUMBER DAYA ALAM, INVESTOR DAN HAK ULAYAT

1. PERTAMBANGAN PT FREEPORT DAN PERSOALANNYA

1 Januari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Tito Karnavian mengungkapkan kasus yang menonjol di tahun 2013 adalah perang suku berjumlah 3 kasus, penembakan di areal PT Freeport Indonesia sebanyak 11 kasus, penyerangan terhadap Polri 6 kasus, penyerangan yang dilakukan oleh OPM/TPN sebanyak 15 kasus. Penembakan yang dilakukan oleh Polri sebanyak 3 kasus, demo anarkis 4 kasus dan pengibaran Bintang Kejora 4 kasus, menentang Otsus 3 kasus, kecelakaan pesawat sebanyak 2 kasus. (*Suluh Papua*)

4 Januari

Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SPSI PT Freeport menggelar konferensi pers di Kantor Sekretariat PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Jalan Hasanudin pada Jumat, 3 Desember. Wakil Ketua PC Yopie Awom mengatakan sebanyak 10 ribu karyawan PT. Freeport SPKEP SPSI Cabang Mimika mengancam akan turun ke jalan pada Senin, 6 Januari 2014 menolak penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. (*Suluh Papua*)

7 Januari

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia menggelar demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika pada Senin, 6 Januari 2014. Aksi demo itu menolak penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut para pendemo, jika UU ini diterapkan maka para karyawan PT Freeport akan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah karyawan yang ada sekitar 15 ribu hingga 21 ribu pekerja dari total 31 ribu pekerja PTFI. Aksi ini demi melindungi, membela dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Terutama hak hidup dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang telah diatur dalam UU 1945. (*Suluh Papua & Cepos*)

10 Januari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Sulistyo Pudjo mengatakan aksi baku tembak di areal Freeport khususnya di wilayah Tanggul Timur Kali Kopi dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis, 9 Januari 2014. Dalam insiden ini dikabarkan satu orang anggota kelompok sipil bersenjata ditembak oleh anggota gabungan TNI dan Polri. (*Cepos, Suluh Papua & Bintang Papua*)

13 Januari

Tentara TPN/OPM Mimika Teny Kwalik membantah pernyataan aparat bahwa dua orang anggotanya tertembak dalam insiden penembakkan di Kawasan Tanggul Timur Kali Kopi. Menurut Teny

ada empat orang bukan dua orang. Lebih lanjut Teny mengatakan, kelompoknya bukan kelompok sipil bersenjata (KSB) atau kelompok orang tak dikenal (OTK). Namun kelompoknya adalah kelompok Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM. Sedangkan seorang korban dalam penembakan tersebut Etinus Wandik (22) dimakamkan di Jalan Baru, depan Gereja GKI (Kingmi) Jemaat Ararat Bugin Timika, Papua. (*Suluh Papua*)

15 Januari

Wakil Direktur Yahamak Vincent Uniyoma mengatakan sejumlah rentetan penembakan yang terjadi di areal PT Freeport selalu dituduhkan kepada OTK/KSB/KKB. Ia mengatakan istilah ini harus dijelaskan dengan benar sehingga tidak melibatkan masyarakat sipil lainnya. Aparat TNI-Polri harus transparan memperjelas istilah tersebut terkait sejumlah kasus penembakan. (*Suluh Papua*)

17 Januari

Ketua DPR Papua Deer Tabuni mengatakan secara resmi telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Minirel (Minerba) untuk disampaikan kepada presiden RI agar melakukan revisi UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. Undang-undang ini membatasi ekspor hasil pertambangan bahan mentah ke luar negeri. (*Cepos & Bintang Papua*)

23 Januari

Kepala Kepolisian Resor Mimika Jeremias Rontini pada Selasa, 22 Januari 2014 mengatakan aparat berusaha meredakan konflik antara dua kelompok masyarakat di Kampung Mulia Kencana-SP7 Distrik Iwaka. Dalam peristiwa itu dua warga tewas yakni Ruben Alom dan Wili Magai. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

25 Januari

Frans Piligame (31) warga Kampung Wonosari SP4 diduga mengalami luka tembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Direktur Lemasa Kabupaten Mimika mengatakan kasus penembakan tersebut

belum bisa dipastikan karena belum memiliki bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. (*Suluh Papua*)

27 Januari

Kepala Kepolisian Resor Miimika AKBP Yeremias Rontini pada Sabtu, 25 Januari 2014 mengungkapkan, pihak polisi sementara mendalami kasus tertembaknya warga sipil atas nama Frans Piligame (31), warga Kampung Wonosari Jaya-SP4 Timika. Untuk sementara pihak polisi belum mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut. (*Suluh Papua*)

13 Februari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyio Pudjo di Mapolda Papua pada Rabu, 12 Februari 2014 mengatakan, bentrok antara dua kelompok Suku Kei di Timika sejak Minggu, 9 Februari hingga Selasa, 11 Februari, sudah memakan korban hingga 30 orang. Satu di antaranya meninggal dunia. Menurut Kombes Pol Sulistyio Pudjo pihak kepolisian telah berusaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh penting dari kedua kelompok yang bertikai itu. Untuk mengantisipasi konflik susulan pihak Polda Papua mengirim sebanyak 60 personil Brimob Detasemen A Jayapura untuk membantu Polres Mimika mengatasi bentrok antar kelompok warga di wilayah itu. (*Papua Pos*)

2 Oktober

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan demonstrasi terhadap manajemen perusahaan karena setiap kali ada kejadian atau musibah di setiap arel kerja, tidak ada hasil atau penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan. Selain melakukan protes, aksi dilakukan dengan pemalangan jalan dengan unit alat berat. (*Cepos & Bintang Papua*)

3 Oktober

Aksi mogok kerja oleh para pekerja PT Freeport masih berlangsung, sekitar 2000 pekerja menggelar aksi mogok di Mile 72,

Tembagapura, Mimika, Papua. Para pekerja menuntut PT Freeport memberikan jaminan keselamatan kerja serta bertanggung jawab terkait kecelakaan yang menewaskan 44 pekerja selama beberapa tahun terakhir. (*Suluh Papua*)

10 Oktober

Aksi pemalangan tambang menuju Grasberg yang dilakukan karyawan Freeport Indonesia pada 8 Oktober 2014 diduga ada orang lain dibelakang dari aksi tersebut. Deer Tabuni meminta agar tuntutan perwakilan tujuh suku harus jelas, sehingga kepentingan dari tujuh suku tersebut bisa diwakilkan dan menjadi satu lembaga sehingga massa bisa terarah dan jelas. Namun kalau ada permainan di belakangnya maka pihaknya tidak mendukung. (*Bintang Papua*)

13 Oktober

Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangun Manurung meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kondisi psikis para pekerja secara rutin terutama mereka yang bekerja pada akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. Hal ini menyusul kecelakaan akibat human error di perusahaan tersebut. (*Suluh Papua*)

2. SUMBER DAYA ALAM DAN HAK ULAYAT

16 Januari

Tokoh adat wilayah Walesi Haliok Jelipele mengatakan pengelolaan dan perlindungan hutan Habema diserahkan ke masyarakat adat. Menurutnya, hutan Habema dulunya luas namun kini mulai terancam rusak. Hal ini menyebabkann ekosistem yang ada di hutan Habema berangsur-angsur punah. (*Cepos*)

5 Februari

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Purnama di ruang kerjanya pada Selasa, 3 Februari 2014 mengatakan investasi di Papua lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang

sangat pesat sekali. Pada 2013 Provinsi Papua diberi target oleh pemerintah pusat sebesar Rp 5,6 triliun dan ternyata sampai pada September 2013 sudah mencapai Rp 18,5 triliun. Kemungkinan pada 2014 target untuk Provinsi Papua akan dinaikan Rp 14 triliun. (*papuapos.com*)

9 Februari

Sabtu, 8 Februari 2014, Ketua LPMA Swamemo Thobias Bagubau mengungkapkan LPMA Swamemo meminta dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menghentikan penambangan ilegal yang berlangsung selama 14 tahun di sepanjang Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai. Menurut Tobi pertambangan tersebut sudah banyak merugikan masyarakat adat maupun Pemda Paniai, Nabire dan Provinsi Papua. Selain itu LPMA Swamemo meminta agar Polda Papua menangkap pengusaha ilegal yang selama ini aktif melakukan pencurian emas dalam jumlah banyak. (*tabloidjubi.com*)

10 Februari

Ketua Dewan Adat Wilayah V Anim Ha JP Kamarka pada Sabtu, 8 Februari 2014 menegaskan dengan adanya Program MIFEE telah membawa konflik horizontal dalam komunitas orang Marind seperti masalah batas tanah marga. Selain itu, orang Marind telah kehilangan atribut budaya dan seni tradisional seperti lagu-lagu adat yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah, identitas marga, kayu kendara, daun mandawu-mandawu serta daun tika (yeiywa), dan kehilangan hutan sebagai tempat mencari makan. (*tabloidjubi.com*)

1 April

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuseray pada Selasa, 31 Maret 2014 di ruang kerjanya mengatakan Gubernur Papua telah mengajukan agar 13 izin HPH yang beroperasi di Papua dan yang tidak aktif segera dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun hal ini belum dilaksanakan.

Menurut Yan dengan adanya izin yang tidak aktif ini hutan Papua sepertinya digadaikan dan masyarakat serta Pemda Papua tidak menggunkan hutan tersebut. (*Cepos*)

2 April

Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Papua Yan Ormuseray pada Rabu, 1 April 2014 di ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya sudah ada Peraturan Gubernur Papua No 13 tahun 2010 tentang pengelolaan hutan adat, namun hal ini tidak berlaku secara optimal karena pada saat itu ada penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sehingga ada pembenahan. Walaupun demikian, pihak Pemda Papua telah menyampaikan ke kementerian agar segera memberikan akses legal kepada masyarakat dengan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengelola hutan ulayatnya. (*Bintang Papua*)

9 April

Di dalam rapat koordinasi pembangunan kehutanan Provinsi Papua pada Rabu, 8 April 2014 Gubernur Lukas Enembe mengatakan rumusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah untuk memberikan ruang kelola dan usaha kayu bagi masyarakat adat pemilik ulayat sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Ormuseray mengatakan, menyelamatkan hutan adalah tugas semua orang di Papua. (*Cepos*)

14 April

Masyarakat di Distrik Muting dan Eligobel, Kabupaten Merauke merasa terintimidasi dengan kehadiran aparat keamanan yang berlebihan di beberapa perusahaan kelapa sawit di Merauke. Menurut seorang tokoh masyarakat Paulus Ndiken, TNI yang berada di perusahaan kelapa sawit itu bukan berasal dari Koramil melainkan kebanyakan dari luar. (*Bintang Papua*)

17 April

Masyarakat adat di Muting, Kabupaten Merauke melakukan penolakan terhadap investasi kelapa sawit di daerahnya. Masyarakat menolak karena menilai bahwa perusahaan kelapa sawit merusak alam dan membuat warga sulit mencari sagu sebagai makanan pokoknya. Sekretaris LMA Distrik Muting Faustinus Ndiken mengatakan sejak 2010 ada tujuh perusahaan sawit yang masuk ke wilayah adat Malind Mbyan Anim dan memakai kira-kira 280.000 hektare. (*Kompas*)

20 April

Masalah yang timbul akibat pelanggaran perjanjian antara investor kelapa sawit dan masyarakat adat di Kabupaten Merauke ditanggapi oleh Ketua Komisi B DPRD Merauke Fransiskus Xaverius Sirfeffa. Menurut Sirfeffa, DPRD Merauke akan memeriksa pelanggaran tersebut. Kalau terjadi pelanggaran, izin perusahaan tersebut akan dicabut. (*Kompas*)

6 Mei

Pihak Polres Manokwari menahan beberapa truk bermuatan kayu olahan merbau dan matoa. Kasus penahannya kayu tersebut terkesan dibiarkan saja. Para pemilik dan sopir truk setelah diminta keterangan dilepaskan saja. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Manokwari Irna Indira, hingga saat ini belum ada SPDP kasus kayu dari Polres Manokwari. (*Suluh Papua*)

7 Mei

Warga dari suku Felle dan Pangkali sebagai pemilik ulayat Sentani Airport melakukan pemalangan di Bandara Sentani pada Selasa, 6 Mei 2014. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara bertanggung jawab dan membayar pembebasan lahan sekitar Rp 400-500 miliar. (*Bintang Papua & Cepos*)

15 September

Beberapa kalangan intelektual masyarakat di Kabupaten Merauke

menilai harga terlalu rendah pada sewa tanah ulayat dalam kontrak kerja bersama PT Papua Argo Sakti (PAS) dan masyarakat ulayat Distrik Anim. Kalau dihitung per meternya tidak sampai 500 perak hanya 225 perak per meter dan masyarakat sangat rugi. (*Bintang Papua*)

23 September

Pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan terus berusaha memberdayakan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua, sehingga mereka mampu mengelolah dan memanfaatkan hutan adat di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat hukum adat dalam mengelolah hutan. (*Cepos*)

8 Oktober

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih Rosye H.R Tandjung mengungkapkan saat ini telah terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati secara terstruktur. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk, masuknya investor, dan pembukaan lahan perkebunan dengan skala besar. Kondisi ini sulit dibendung bila dikaitkan dengan perkembangan zaman. Jika tak disikapi secara bijak maka Papua akan kehilangan flora fauna dari keanekaragaman hayati yang secara otomatis berdampak pada kerusakan ekosistem. (*Cepos*)

11 Oktober

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Yan Yap L. Ormuseray mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemprov Papua telah mengeluarkan 15 izin untuk usaha pengelolaan hutan bagi masyarakat adat di Provinsi Papua. Sedangkan regulasi pengelolaan hutan oleh masyarakat adat sudah disiapkan Pemprov. (*Cepos*)

13 Oktober

Wakil Bupati Merauke Sunarjo mengatakan Lahan seluas 1,2 juta hektare atau 20 persen akan dialihfungsikan menjadi lahan

pertanian dan perkebunan. Artinya dari 20 persen akan terpakai untuk program MIFEE. (*Bintang Papua*)

Bab 4

PERTAHANAN KEAMANAN DAN KINERJANYA

I. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

3 Januari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Aula Rumatama, Mapolda Papua pada Kamis, 2 Januari 2014 mengatakan aksi-aksi OPM menjadi tantangan Katibmnas di wilayah hukum Polda Papua selama tahun 2014. Ia memprediksi situasi 2014 akan meningkat tajam, antara lain pemilu legislatif dan pemilihan presiden RI. (*Bintang Papua*)

4 Januari

Dosen HI Fisip Uncen dan Pengamat Sosial Politik Papua Marinus Yaung mengatakan kematian Danny Kogoya tidak mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan pemerintah PNG. Alasannya, kedua pemerintah sedang bekerja sama untuk membuat laporan lengkap riwayat kesehatan Danny Kogoya sampai pada hari kematian. (*Cepos*)

16 Januari

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy di Manokwari pada Rabu, 15 Januari 2014 mengatakan Pemerintah RI dinilai mengalihkan perhatian soal pelanggaran HAM. Hal ini terbukti dengan hanya mempertemukan delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. (*Papua Pos*)

23 Januari

Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Rafles Manurung di Markas Kodim 1710/Mimika pada Rabu, 22 Januari 2014 mengharapkan prajurit TNI yang berada di wilayah teritorial Kodim Mimika untuk bersiaga dan waspada terhadap serangan dari kelompok separatis TPNPB-OPM. Semua pos pengamanan maupun tempat penyimpanan senjata milik TNI harus mendapat pengawalan ketat untuk menghindari penyerangan yang bisa dilakukan oleh kelompok separatis. (*Suluh Papua*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian pada Rabu, 22 Januari 2014 mengatakan, telah memetakan potensi kerawanan yang akan timbul, pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Untuk mengantisipasi konflik kerawanan pihaknya telah berkoordinasi dengan semua stakeholder baik KPU, Panwaslu, TNI, Pemda, media masa dan sejumlah partai politik. (*Bintang Papua*)

28 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan usai bertemu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 28 Januari 2014 mengatakan insiden penembakan yang selama ini terjadi di beberapa daerah di Papua bukanlah untuk meminta merdeka, tetapi lebih dilatarbelakangi kriminal. Pihak Pemprov Papua telah meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum. Di tempat yang sama Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi mengatakan tidak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua, apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif. Selain itu, Menkopolkam Djoko Suyanto mengatakan tidak ada lagi operasi pengejaran oleh militer di Papua maupun Papua Barat. Pemerintah hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. (*tabloidjubi.com & Cepos*)

29 Januari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Hotel Aston pada Rabu, 29 Januari 2014 mengatakan sejumlah persoalan di Papua saat ini masih menjadi ancaman yang berpotensi konflik pada pelaksanaan Pileg yang akan digelar pada 9 April mendatang. (*Suluh Papua*)

4 Februari

Di Kampung Sasawa, Serui, pada Sabtu, 1 Februari 2014 terjadi konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI-polisi dengan OPM. Pihak aparat gabungan TNI dan Polisi memaksa masyarakat untuk menunjukkan markas OPM Serui. Aparat TNI/Polri menangkap dan menahan 10 orang warga di Polres Serui. Peristiwa ini juga memakan korban satu anggota OPM mati tertembak dan tiga aparat TNI-Polisi luka-luka; satu anggota Polisi Air, satu anggota kriminal TNI dan Motoris. Sedangkan masyarakat kampung lari masuk hutan. (*tabloidjubi.com*)

6 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2014 menuduh aparat keamanan dan militer

di Papua telah menjual peluru kepada warga Papua. Tuduhan Gubernur Papua ini bukan tanpa alasan. Menurut Lukas, para pelaku penembakan atau baku tembak dengan aparat keamanan di Papua seakan tak pernah kehabisan peluru. Gubernur berharap Kapolri dan Panglima TNI untuk memperhatikan persoalan ini secara serius. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Yoris Raweyai. Menurut Yoris, aparat keamanan datang ke Papua membawa peluru tetapi pulanginya tidak ada peluru yang tersisa. Sedangkan di Kabupaten Nabire, khususnya di daerah pertambangan Degeuwo masyarakat sipil mempunyai senjata api. Menurut pemilik senjata (MA), pistol yang ada dibeli dari seorang anggota TNI. Pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo. (*tabloidjubi.com*)

7 Februari

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman di Balai Kartini, Jakarta pada Jumat, 7 Februari 2014 mengatakan tak akan menambah personel TNI di Papua. Pihak TNI akan mengambil langkah yang lebih humanis untuk menghadapi kekacauan yang ditimbulkan oleh pengganggu keamanan. (*merdeka.com*)

14 Februari

Sejumlah barang bukti diamankan aparat usai kontak senjata pada 1 Februari 2014 di Kampung Sasawa, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen. Kontak senjata tersebut mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan menewaskan Yosua Arumpayai dan melukai dua anggota TNI/Polri serta seorang warga sipil. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Yapen AKBP Gatot Suprasetya di Serui pada Kamis, 13 Februari 2014 membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, hingga kini aktivitas warga lumpuh total. (*Suluh Papua*)

3 Mei

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua

di Lapangan Kodam pada Jumat, 2 Mei 2014 mengatakan saat ini pihak TNI masih secara intens memonitor beberapa daerah yang dianggap menjadi lokasi rawan. Dua wilayah yang dianggap serius adalah perbatasan Skow (perbatasan PNG-RI) dan Kabupaten Mimika. *(Cepos)*

5 Mei

Sebanyak 12 personil Kodim 1714 Puncak Jaya mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa dari Mabes TNI karena jasanya bekerja baik demi keutuhan NKRI. Hal ini disampaikan Kasrem 173 Praja Vira Braja Kolonel Inf Makmur ketika membacakan amanat Kasad TNI AD di Lapangan Upacara Mulia, Puncak Jaya pada Jumat, 2 Mei 2014. *(Cepos)*

19 Mei

Sebanyak 250 calon bintara Polri yang tidak lulus seleksi melakukan aksi di Mapolres Sorong, Papua Barat, pada Rabu, 14 Mei 2014. Mereka didampingi orang tuanya masing-masing, menagih janji Wakapolda Brigjen Pol. Paulus Waterpauw yang mengatakan akan memprioritaskan orang asli Papua. *(Suluh Papua)*

20 Mei

Tim Khusus Polda Papua berhasil mengungkapkan dua pelaku penyalur senjata api ke Papua. Tiga jenis senjata yang dibeli dari Filipina digagalkan di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Hal ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistiyo Pudjo di Mapolda Papua pada Senin, 19 Mei 2014. *(Suluh Papua & Bintang Papua)*

23 Mei

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Kota Jayapura pada Rabu, 21 Mei 2014 mengatakan ada pejabat Papua yang terlibat di dalam proses penyaluran senjata api ke Papua. Menurut Tito, sudah dua kali pejabat Papua mendanai pembelian senjata api dari Filipina. *(Suluh Papua)*

27 Juni

Menteri Pertahanan & RB RI Azwar Abubakar di Mapolda Papua pada Kamis, 26 Juni 2014 menyetujui pembangunan Polda Papua Barat sebagai prioritas pertama. Selain itu Menteri Pertahanan juga setuju adanya usulan pembentukan Polres Lanny Jaya dan Polres Mamberamo Raya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Kapolda Papua bersama pejabat utama Polda Papua. (*Cepos*)

6 September

Pihak Polda Papua merilis 52 orang yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) di seluruh jajaran Polda Papua. Lima puluh dua orang DPO ini dibagi menjadi DPO Polda Papua sebanyak 17 orang, DPO Polres Puncak Jaya 11 orang, Polres Jayawijaya berjumlah tujuh orang, Polres Kota Jayapura delapan orang, dan Polres Kepulauan Yapen sebanyak sembilan orang. Dari 52 DPO tersebut, 44 orang diantaranya adalah KKB. (*Cepos*)

22 September

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan yang menewaskan seorang warga Jhon Agapa di Kilo 74, Jalan Trans Nabire, Distrik Diva, Kabupaten Nabire pada 18 September 2014. (*Bintang Papua*)

23 September

Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai Panglima Kodam XVII/Cederawasih Mayjend TNI Christian Zebua selama dua tahun dalam kepemimpinannya di Tanah Papua dinilai sukses. Karena, panglima mampu merangkul seluruh komponen masyarakat, baik yang berkonflik maupun menghadapi situasi penembakan yang selama ini terjadi. Penilaian ini disampaikan oleh Sekretaris DPR Papua Yulius Miagoni. (*Bintang Papua*)

9 Oktober

Kepala Polres Kepulauan Yapen AKBP Gatot Suprasetya mengatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memburu dua DPO yakni Maikel Merani dan Noky Orarei dengan berbagai cara. (*Suluh Papua*)

13 Oktober

Kapolres Yapen AKBP Gatot Suprasetya mengatakan bahwa tim khusus yang beranggotakan 15 personil pada 11 September sekitar pukul 10.00 WIT melakukan penggerebekan terhadap markas panglima TPN-OPM wilayah Pantai Utara Maikel Merani di Kampung Tindaret, bukit Gunung Kirihiho. Dijelaskan Kapolres Gatot, sebelum melaksanakan operasi pihaknya sudah memberikan deadline dan seruan lewat media untuk menyerahkan diri tapi tidak ditanggapi. (*Suluh Papua, Cepos & Bintang Papua*)

Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua mengusulkan pembangunan Kodim di daerahnya. Hal ini untuk menunjang keamanan. Usulan pembangunan Kodim di Mappi disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mappi Benyamin Ngali. (*Suluh Papua*)

16 Oktober

Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mendesak Kapolda agar segera mengusut dalang pengiriman ratusan amunisi ke Lanny Jaya yang berhasil diamankan Polres Jayapura di Bandara Sentani. (*Cepos*)

Pangdam TNI XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses G Siahaan mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi sistem pengamanan di kawasan perbatasan NKRI dan PNG untuk memberikan ruang bagi masyarakat setempat melihat perkembangan pembangunan yang terjadi di Papua. Menurut Pangdam, peningkatan pengamanan di kawasan perbatasan bertujuan untuk mencegah adanya gangguan dari kelompok bersenjata. (*Cepos*)

6 November

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus berupaya mencari tempat untuk rencana pembangunan Markas Brimob di Kabupaten Jayawijaya. Upaya ini dilakukan oleh Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo yang menghadirkan masyarakat dan tokoh-tokoh dari tiga distrik. (*Cepos*)

12 November

Kepala Satuan Brigade Mobil (Kasat Brimob) Polda Papua Kombes Pol Mathius D Fakhiri mengungkapkan pihaknya masih membutuhkan paling tidak tiga detasemen baru saat ini. (*Cepos*)

14 November

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende mengusulkan peresmian Polda Papua Barat pada akhir 2014 agar bisa beroperasi penuh pada 2015. Sementara itu Brigjen Pol Paulus Waterpauw masih menjadi calon tunggal Kapolda Papua Barat. (*Cepos*)

24 November

Keluarga korban dan Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) menantang pihak Polda Papua melakukan bedah perkara terkait misteri 17 orang hilang dalam perjalanan menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa dari Serui tujuan Kasonaweja, Mamberamo Raya pada 3 Maret 2009. Hal ini disampaikan oleh Eni Tan di Abepura setelah pertemuan dengan Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Natalius Pigai. (*Bintang Papua*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende mengakui dari 35 tersangka dugaan penyalagunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang ditahan Polda Papua, ada indikasi keterlibatan oknum anggota Polisi maupun oknum TNI. Indikasi ini berasal dari keterangan langsung 35 tersangka. (*Cepos*)

1 Desember

Tim gabungan dari TNIAU, AD dan SAR terus melakukan pencarian

terhadap Helikopter jenis puma milik TNI AU yang hilang kontak sejak 28 November 2014. Danlanud Jayapura Kolonel Pnb. I Made Susila A melalui Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Jayapura Mayor Sus. Juni Kurniawati menjelaskan kalau sampai saat ini belum diketahui keberadaan heli itu. Tetapi, informasi yang didapat semua penumpangnya selamat. (*Cepos*)

Bab 5

KONFLIK DAN PERDAMAIAN

1. KONFLIK PEGUNUNGAN TENGAH

4 Januari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo membenarkan terjadinya penyerangan pos Brimob di Distrik Kulirik, Puncak Jaya. Berdasarkan laporan warga penyerangan pos Brimob terjadi sekitar pukul 15.45 WIT, Sabtu, 4 Januari 2014. Sebanyak 8 senjata api (1 jenis Moser, 2 AK China dan 5 SSI) serta 135 butir peluru telah dibawa lari oleh para penyerang pos Brimob. (*Papua Pos*)

7 Januari

Terkait dengan penyerangan pos Brimob Ketua DPR Papua Deer Tabuni pada Senin, 6 Januari 2014 menghimbau kepada kelompok yang mengambil senjata api milik Polri segera mengembalikannya. Selain itu Deer Tabuni curiga perampasan senjata api milik Polri itu karena pihak OPM marah terhadap pemerintah. Diharapkan pihak Polda Papua mengejar kelompok tersebut. (*Bintang Papua & Cepas*)

20 Januari

Pada Sabtu, 18 Januari 2014 di Pos Kompas Unit Intel Kodim 1714/PJ Kota Lama, Mulia terjadi penyerangan yang dilakukan oleh OPM. Penyerangan ini mengakibatkan Praka Adi dan Serda Laowe mengalami luka tembak. (*Bintang Papua & tabloidjubi*)

Kepala Polsek Tiom, Kabupaten Lanny Jaya Iptu RL. Tahapary mengungkapkan Pemkab Lanny Jaya menganggarkan dana pembangunan Polsek Tiom sebesar Rp 4 miliar lebih. Anggaran tersebut diambil dari APBD tahun 2013. (*Cepas*)

25 Januari

Di Kabupaten Puncak Jaya, Distrik Mulia pada Jumat, 24 Januari 2014 kembali terjadi penembakan antara OPM dengan TNI Polri ketika TNI Polri melakukan patroli di Kampung Yambi. Personil TNI berhasil menembak mati satu anggota TPN-OPM dan berhasil mengambil 1 pucuk senjata api jenis AK. Sementara itu satu anggota personel dari TNI Pratu Sugianto tertembak mati. (*Cepas*)

27 Januari

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral TNI Budiman pada Minggu, 27 Januari 2014 menyatakan seluruh warga Papua adalah rakyat Indonesia. Namun apabila masyarakat asli Papua bersenjata maka mereka harus berhadapan dengan TNI. Ia akan mencari tahu dan mengejar kelompok bersenjata yang terlibat dalam kontak senjata di Puncak Jaya. (*Suluh Papua*)

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pudjo Hartono di Mapolda Papua pada Senin, 27 Januari 2014 mengatakan tim Khusus Polda Papua berhasil membekuk seorang YT (19). Menurutnya, Yemiter Telenggen ditangkap polisi saat berjalan di Kota Baru Mulia. Yemiter Talenggen ditangkap berdasarkan hasil olah TKP dan informasi dari saksi-saksi. (*Papua Pos*)

28 Januari

Ketua DPR Papua Deer Tabuni meminta TNI dan Polda Papua untuk menghentikan pengejaran yang dilakukan oleh anggota TNI-Polri terhadap kelompok OPM. Pengejaran ini menyebabkan keresahan dan ketakutan masyarakat sipil yang tidak tahu tentang persoalan tersebut. Seperti yang terjadi ketika masyarakat beribadah di Gereja Dondobaga. Pihak TNI Polri memerintahkan jemaat yang lagi beribadah merayap di tanah. Pihak TNI Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Cristian Zebuah membantah pernyataan tersebut. (*Cepos*)

29 Januari

Ratusan mahasiswa pemuda dan pelajar Kabupaten Puncak Jaya melakukan demo di halaman Kantor Gubernur Papua pada Selasa, 28 Januari 2014. Mereka meminta Gubernur Lukas Enembe untuk secara serius menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. (*Cepos*)

5 Februari

Komandan Kodim (Dandim) 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Ahmad Risman pada Minggu, 26 Januari 2014 meminta aparat Polresta Puncak Jaya menangkap warga yang dicurigai anggota TPN-OPM di Gereja Gidi, Distrik Gondobaga, Kabupaten Puncak Jaya. Pihak kepolisian setempat mengklaim Gereja Gidi menjadi tempat persembunyian senjata. Perintah pemeriksaan yang berlanjut dengan penahanan beberapa warga sipil berawal dari peristiwa perampasan delapan senjata otomatis dan amunisinya oleh anggota TPN-OPM di Pos Polisi Kulirik, Distrik Gondobaga,

Puncak Jaya pada Sabtu, 25 Januari 2014. Inisial SH (saksi dan korban penyeragaman) menyebutkan sebanyak tujuh warga lokal ditahan saat pemeriksaan yang dilakukan di halaman Gereja. Salah satu di antaranya seorang Pendeta Gereja Gidi di Gondobaga. Ketika dikonfirmasi Kapolresta Puncak Jaya AKBP Marselis Sarimin mengatakan bahwa benar adanya pemeriksaan dan penangkapan terhadap warga lokal pada Minggu, 26 Januari 2014. Menurut SH ketujuh warga yang ditahan adalah jemaat gereja setempat yakni Penius Telenggen, Tigapur Enumbi, Niyo Murib, (Pendeta) Kameron Telenggen, Ore Telenggen, Baniur Enumbi dan Timiunus Telenggen. (*sinarharapan.com*)

7 Februari

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat ada 6 isu utama di Papua pada tahun 2013. Wakil Ketua ALDP Yusman Conoras dalam jumpa pers bersama Poengky Indarti dari Imparsial, Pastor Jhon Djonga dan Ivan Simamora di Kantor ALDP pada Jumat, 7 Februari 2014 menyampaikan di Papua ada 6 isu utama diantaranya RUU Otsus Plus, aksi kekerasan, Tapol/Napol, kebijakan pembangunan, Ekosob dan masalah pelayanan publik. Menurut Yusman pemerintah pusat di Jakarta dan daerah harus memperhatikan masalah hukum dan HAM di Papua yang semakin memburuk. Di tempat yang sama, Pastor Jhon Djonga, Pr dan Ivan Simamora menyoroti persoalan ekonomi yang perkembangannya malah menelantarkan masyarakat asli, kehidupan sosial yang semakin amburadul, budaya yang terkikis zaman dan rendahnya mutu pelayanan publik. Kedua pastor ini berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan menegakkan hukum seadil-adilnya. (*majalahselangkah.com*)

Ketua DPR Papua Deerd Tabuni pada Jumat, 7 Februari 2014 meminta agar dalam menyelesaikan masalah kekerasan di Puncak Jaya, aparat keamanan tak asal tangkap. Menurut Deerd mekanisme dalam mengatasi persoalan tersebut harus jelas dan

benar menurut hukum. (*tabloidjubi.com*)

8 Februari

Pernyataan Gubernur Lukas Enembe terkait oknum TNI/Polri yang menjual amunisi ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo pada Jumat, 7 Februari 2014. Menurut Sulistyo Pudjo kelompok kriminal bersenjata berusaha mencari sumber senjata maupun amunisi baik dari dalam maupun luar Indonesia sehingga mereka mampu meningkatkan jumlah maupun kualitas senjata. (*Suluh Papua*)

9 Februari

Sabtu, 8 Februari 2014 aparat TNI dan Polri kembali menggelar sweeping di Gereja Karubate, Puncak Jaya. Sweeping ini dilakukan terkait adanya dugaan senjata yang dirampas TPN/OPM tersimpan di gereja tersebut. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman meminta Presiden Indonesia SBY untuk menghentikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI di Puncak Jaya. (*majalahselangkah.com*)

12 Februari

Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan TNI-Polri di Kabupaten Puncak Jaya dan Yapen, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta menggelar konferensi pers pada Rabu, 12 Februari 2014 di Asrama Mahasiswa Papua, Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta. Mereka mengutuk tindakan brutal TNI-Polri di Puncak Jaya dan Yapen yang mengorbankan rakyat sipil. Ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, yakni hentikan penyisiran TNI-Polri dan tarik seluruh militer (TNI-POLRI) organik maupun non organik dari Papua. Kedua, hentikan eksplorasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperealis dan kapitalis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll. Ketiga, berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian persoalan Papua. (*papuapos.com*)

19 Februari

Kepala Distrik Muara, Mulia, Puncak Jaya Samianto Wonda pada Rabu, 19 Februari 2014 via telepon selulernya mengatakan di Puncak Jaya tidak ada pabrik segala jenis senjata api. Senjata api yang beredar di sana merupakan permainan oknum yang tidak bertanggungjawab. Samianto meminta pimpinan TNI/Polri, Pemda, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pihak-pihak terkait agar tidak menyudutkan, menyalahkan dan memburu TPN/OPM. Tetapi sebaiknya mencari tahu akar permasalahan sebenarnya dan menyelesaikannya secara teliti dan akurat. (*tabloidjubi.com*).

7 Mei

Tiga anggota Brimob yang bertugas di Dogiyai menembak tiga warga sipil. Penembakan ini bermula dari peristiwa tabrakan yang dialami oleh dua warga Yunsen Kegakoto dan Jhon Anouw. Karena peristiwa ini warga melakukan aksi di Pos Brimob. Dari aksi ini anggota Brimob menembak tiga warga yaitu Anton Edowai, Yulius Anouw dan Jhon Anouw pada Selasa, 6 Mei 2014, seperti dilaporkan oleh Beni Goo. (*Suluh Papua & Cepas*)

31 Mei

Di Kampung Yogobok, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya pada Jumat, 30 Mei 2014 terjadi penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Akibat penembakan ini, salah satu anggota kepolisian badan kendali operasi Polres Lanny Jaya Bripda Irfan tewas. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyio Pudjo Hartono. (*Cepas*)

23 September

Adanya sejumlah aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya dalam beberapa bulan terakhir membuat aparat keamanan baik dari Kepolisian maupun TNI terus bersiaga di sejumlah daerah rawan di Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini disampaikan oleh Kabidhumas Polda Papua Kombes

Pol Sulistyo Pudjo Hartono. (*Cepos*)

2 Oktober

Aparat Keamanan dari kepolisian maupun TNI akan mengirim pasukan ke daerah di Pegunungan Tengah Papua terutama Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende. (*Bintang Papua*)

3 Oktober

Seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Makki, Kabupaten Jayawijaya bernama Bripol Maikel Bano dikabarkan dibunuh oleh orang tak dikenal ketika mengantar undangan kepada masyarakat di Kampung Manuk, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. (*Cepos*)

Wakil Bupati Lanny Jaya Berthus Kogoya meminta masyarakat Lany Jaya yang mengungsi dan lari ke hutan akibat konflik yang terjadi antara kelompok sipil bersenjata dengan aparat keamanan untuk kembali ke kampungnya masing-masing karena saat ini situasi dan kondisi di Lanny Jaya sudah aman. Dirinya menjamin kedepannya tidak lagi terjadi konflik serupa. (*Cepos*)

7 Oktober

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramadey menyatakan prihatin atas aksi penembakan terhadap warga yang diduga dilakukan anggota Brimob di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya pada 30 September 2014. (*Cepos*)

8 Oktober

Bupati Puncak Willem Wandik menegaskan masyarakat TNI, Polri dan Pemda Puncak sudah sepakat untuk menolak kehadiran dan siap melawan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Bahkan Pemkab menetapkan denda sebesar Rp 2 miliar dan diusir dari kampung kepada masyarakat yang menampung KKB. Menurut Willem kehadiran KKB sangat menyusahkan warga dan masyarakat

tidak merasa aman, serta pembangunan di Puncak tidak berjalan baik. (*Cepos*)

10 Oktober

Ketua DPR Papua Deerd Tabuni menilai lima kesepakatan yang ditandatangani oleh masyarakat, Pemkab Lanny Jaya dan aparat belum cukup kuat karena tidak melibatkan yang selama ini melakukan serangkaian aksi di Kabupaten Lanny Jaya seperti Edem Wanimbo dan Puron Wenda. (*Bintang Papua*)

14 Oktober

Sejumlah Anggota Brimob Polda Papua terlibat kontak senjata dengan anggota TNI Batalyon 756 di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya Papua. Pertikaian ini terjadi sekitar pukul 15.25 WIT. Komandan Pos Tiom Letnan Dua Infanteri Ali Okta terkena tembakan di lutut bagian kiri. (*Bintang Papua*)

15 Oktober

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende mengatakan 147 amunisi dari beberapa jenis senjata yang berhasil digagalkan oleh petugas keamanan bandara Sentani saat hendak diselundupkan oleh tersangka bernisial TW pada 12 Oktober lalu merupakan pesanan dari Puron Wenda dan Enden Wanimbo di wilayah Lanny Jaya. Kedua pimpinan KKB ini masih terus dikejar oleh aparat TNI dan Polri terkait penyerangan terhadap aparat keamanan di wilayah itu. (*Bintang Papua & Cepos*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende membentuk tim investigasi kasus bentrok antara Brimob-TNI di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya. Tim ini akan ke Kabupaten Lanny Jaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (*Bintang Papua & Cepos*)

Adanya aksi saling serang yang melibatkan TNI Batalyon 756 dan Brimob Polda Papua di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua tidak berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan

pemerintah di Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Lanny Jaya Berthus Kogoya. (*Bintang Papua & Cepos*)

Pihak TNI dan Polri sepakat menarik sejumlah senjata dari semua anggota Brimob dan TNI yang bertugas di Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, pasca bentrok baku tembak antara TNI dari Batalyon 765/ Wamena dengan anggota Brimob dari Kelapa Dua Jakarta pada 13 Oktober 2014. Demikian disampaikan Kapolda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. (*Suluh Papua*)

21 November

Tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditembak kakinya dengan peluru karet dalam bentrok antara anggota KNPB dengan pasukan keamanan gabungan Polri - TNI. Bentrok itu sendiri bermula aksi anarkis yang dilakukan oleh KNPB di terminal Moenamani, Distrik Kamo, Kabupaten Dogiyai. Selain tiga orang yang tertembak kakinya, sebanyak 11 orang lainnya diamankan oleh pihak keamanan karena melakukan aksi anarkis. (*Cepos*)

2. TRAGEDI PANIAI 8 DESEMBER

Kronologi peristiwa insiden penembakan yang terjadi di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 ini dihimpun dari berbagai sumber: Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika, KPKC Kingmi Papua, jurnalis atau media dan Dewan Adat Paniai.

7 Desember

Bukit Togokotu, Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, pukul 20.00 WIT. Sekitar 12 orang anak remaja, antara lain Mia Gobay (13), Elikian Pigai (12), Elia Gobay (10), Aten Gobay (12), Diston Yeimo (12), Ferry Gobay (8), Benyamin Giyai (9), Anika Pigai (13), Abimelek Pigai (14), Oktovince Yeimo (12), Yulian Gobay (16) dan Henok Gobay (18) berada di Pondok Natal yang terletak di pinggir jalan raya Enarotali-Madi di bukit Togokotu.

Tak lama kemudian muncul sebuah motor dari Enarotali menuju Madi tanpa menyalakan lampu motor. Sampai di depan Pondok Natal, si pengendara motor ditegur oleh beberapa anak karena lampu motor tidak dinyalakan. Mendengar teguran itu, spontan si pengendara berhenti dan mengancam untuk memanggil teman-temannya. Si pengendara memutar kembali motornya dan menuju ke arah Madi.

Sekitar 15 menit kemudian, datang sebuah mobil Toyota Rush hitam bernomor polisi B 2938 CD dari arah Madi dan berhenti tepat di depan Pondok Natal. Dari dalam mobil turun tujuh orang anggota TNI dari Tim Khusus (Timsus) Yonif 753 Pos Uwibutu. Beberapa orang menggunakan pakaian preman, lainnya menggunakan pakaian TNI, dan melepaskan tembakan tiga kali ke udara dan menyerbu anak-anak yang berada di dalam Pondok Natal.

Henok Yeimo, salah satu dari anak-anak yang tetap memilih tinggal di dalam Pondok Natal dipukul dengan popor senjata sehingga mengalami luka di bagian kepala, dada, dan kaki. Ada luka sobek di kepala dan kakinya bengkak karena ditendang dengan sepatu laras. Korban mengaku sempat ditampar berulang kali. Aparat kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju arah Madi.

Pada pukul 20.40 WIT, anak-anak yang berada di Pondok Natal itu dan korban pemukulan Henok Yeimo melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Distrik Paniai Timur yang rumahnya berjarak 100 meter dari tempat kejadian perkara. Selain menceritakan kejadian, Henock juga menunjukkan bekas luka yang ada di tubuhnya. Mendengar cerita itu, spontan Kadis bersama sejumlah anak dan korban pemukulan Henok Yeimo mendatangi Polres Paniai yang berada di Madi untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolres Paniai. Di Mapolres Paniai, mereka bertemu dengan Wakapolres Kompol Hanafia. Tanggapan Wakapolres Kompol Hanafia adalah persoalan tersebut akan diselesaikan keesokan hari. Kadis kemudian membawa anak-anak ke RSUD Madi,

bersama dengan Wakapolres. Kadis meminta korban divisum, namun Wakapolres mengatakan visum harus dilakukan esok harinya, kemudian Kadis kembali membawa pulang anak-anak ke kediamannya.

8 Desember

Pukul 07.00 WIT, Mobil Toyota Rush hitam yang semalam digunakan oleh pelaku pemukulan ditahan oleh pemuda-pemuda kampung Ipakiye, yang telah melakukan pemalangan jalan sejak pagi hari. Diketahui, penumpang yang keluar dari dalam mobil adalah lima orang anggota TNI dari Timsus 753. Pemuda-pemuda itu kemudian menghancurkan mobil tersebut dan menuntut agar pihak polisi memberitahu siapa pelaku penganiayaan tadi malam. Pihak polisi pun datang ke TKP tanpa merespon permintaan massa pemalang.

Beberapa waktu kemudian, Wakil Bupati, Muspida dan Kepala Distrik Paniai Timur hadir di TKP dan massa pemalang dapat diredakan, lalu semua massa duduk dengan tenang untuk mendengar arahan dari Wakil Bupati, Muspida dan Kepala Distrik Paniai Timur. Saat memberikan arahan, tiba-tiba dalam waktu bersamaan dari arah Enarotali dan Madi muncul pasukan TNI/Polri dan mengeluarkan rentetan tembakan di atas massa dan sempat menodong Wakil Bupati dengan senjata. Situasi berubah makin panas, massa ditekan dari belakang oleh polisi dengan rentetan tembakan menuju arah Enarotali dan dari depan (Madi) massa pihak TNI memancing massa dengan rentetan tembakan untuk mengarahkan massa bergerak ke arah Enarotali.

Puluhan massa yang rata-rata anak SMA kemudian melakukan long march dari bukit Togokotu menuju Lapangan Karel Gobay yang berjarak sekitar tujuh kilometer. Pukul 10.00 WIT, massa yang didominasi oleh para remaja tiba di Enarotali dan langsung mengadakan yuu/waita keliling lapangan Karel Gobay dan melempari Polsek Paniai Timur. Beberapa anggota Polisi

menggunakan senjata lengkap bersiaga di halaman Kantor Polsek. Dalam waktu yang sama, massa juga melempari Koramil yang berjarak sekitar 50 meter dari Polsek.

Menanggapi situasi ini, spontan pasukan polisi dan tentara mengeluarkan rentetan tembakan ke udara untuk membubarkan massa, tapi karena massa terus bertahan di Lapangan Karel Gobay, aparat polisi dan tentara keluar dari pagar Kantor Polsek dan Koramil terus menghujani tembakan, kali ini tembakan diarahkan menuju massa hingga ke depan kantor Distrik Paniai Timur yang terletak di Lapangan Karel Gobay.

Massa yang takut berlarian, dan terjepit di sudut Lapangan Karel Gobay selama kurang lebih 15 menit. Massa mencoba menyelamatkan diri dengan melompat pagar-pagar kebun di belakang lapangan ke arah lapangan terbang. Ada yang terkena tembakan dan meninggal serta mengalami luka-luka. Situasi baru reda ketika telah jatuh korban dari pihak masyarakat dan beberapa waktu kemudian Bupati Paniai Hengky Kayame dan Wakil Bupati Yohanis You berada di tempat kejadian dan menenangkan situasi di depan Polsek Paniai Timur. Setelah kejadian penembakan, Wakapolres Paniai dan beberapa anggotanya memungut sisa-sisa amunisi di TKP. Mereka berhasil mengamankan sisa amunisi sebanyak satu kantong plastik hitam dan dibawa ke Kantor Polsek Paniai Timur.

Korban yang ditembak mati:

1. Simon Degey, SMA YPPGI, mati di tempat
2. Apinus Gobay, SMA Kelas 2, mati di tempat
3. Alfius Youw, kuli bangunan, mati di tempat
4. Yulian Yeimo, SMA Kelas 1, mati di tempat

Korban yang dirawat di RSUD Madi

1. Otinus Gobay (SMA Kelas 2), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
2. Oni Yeimo (Pemuda), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
3. Yulian Mote (PNS di lingkungan Pemkab Paniai), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
4. Oktovianus Gobay (SMP Kelas 1), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
5. Noak Gobay (Kuliah STIKIP Paniai Semester V), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
6. Bernadus Magay (SD Kelas 4), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
7. Akulian Degey (SMA Kelas 3), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
8. Augusta Degey (Ibu Rumah Tangga), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
9. Abernadus Bunay (SD Kelas 5), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
10. Neles Gobay (PNS), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
11. Jerry Gobay (SD Kelas 3), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
12. Marci Yogi (Ibu Rumah Tangga), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
13. Oktoviana Gobay (SD Kelas 5), status: sedang dirawat di RSUD Paniai

14. YulianTobay (Satpam RSUD Madi), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
15. Andreas Dogopia (Pemuda), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
16. Yulita Edoway (Ibu Rumah Tangga), status: sedang dirawat di RSUD Paniai
17. Jerry Kayame (Kepala Kampung Awabutu), status: sedang dirawat di RSUD Paniai

9 Desember

Tim Penyidik Polda Papua ke Paniai dan saat bersamaan sekitar pukul 16.00 WIT bersama dengan rombongan bupati dan masyarakat menemui korban dan keluarganya di Kampung Ipakiye untuk meminta keterangan, setelah itu tim penyidik bersama rombongan ke RSUD Madi untuk meminta keterangan pada korban yang sedang dirawat.

10 Desember

Tim Forensik dari Mabespolri ke Paniai untuk memeriksa korban dan melakukan olah TKP. Jenazah ditahan di Lapangan Karel Gobay selama tiga hari dengan maksud agar Pangdam dan Kapolda Papua turun ke Paniai untuk melihat secara langsung korban. Pihak Pangdam dan Kapolda tidak hadir di Paniai maka Bupati Paniai dan Wakil Bupati serta Kepala Distrik Paniai Timur dan Kepala Distrik Bibida bernegosiasi dengan pihak korban untuk membicarakan soal pemakaman dan Bupati Paniai memberi bantuan dana sebesar Rp 130 juta. Uang tersebut dipakai untuk membeli beberapa ekor babi untuk syukuran secara adat.

Upacara pemakaman dilaksanakan pada 10 Desember 2014, pukul 17.00 WIT. Upacara ini dilaksanakan secara adat suku Mee. Keempat korban dimakamkan secara massal di Lapangan Karel Gobay di bawah tiang bendera yang letaknya persis di depan

Markas Koramil Paniai Timur tempat terjadi penembakan.

11 Desember 2014

Pukul 17.00 WIT, tim khusus TNI/Polri ke TKP pertama di Kampung Ipakiye untuk bertemu para korban namun diusir oleh Bupati Paniai dan Kepala Distrik Paniai Timur karena kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.

Advokasi Kasus Paniai

8 Desember

Pada pukul 13.30-15.00 WIT di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Jalan Sosial, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) John NR Gobay melakukan jumpa pers terkait penembakan empat pemuda: Alpius Youw (17), Yulian Yeimo (17), Simon Degei (18), dan Alpius Gobai (17) di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai, Papua. Jumpa pers dihadiri berbagai wartawan media lokal dan nasional. DAP mendesak Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas “pembantaian” empat pemuda, serta melukai puluhan orang lainnya. (suarapapua.com)

9 Desember

Pada pukul 09-00-14.00 WIT di Kantor DPR Papua, massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) melakukan aksi demonstrasi damai. Massa mendesak DPR Papua membentuk Pansus untuk turun ke Enarotali, Paniai, melakukan investigasi terhadap penembakan empat pemuda. Massa diterima sejumlah anggota DPR Papua, seperti Laurenzius Kadepa, Decky Nawipa, Matea Mamayao, Elvis Tabuni, dan sejumlah anggota lainnya. (papuapos.com)

Sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM melakukan jumpa pers terkait peristiwa di Paniai. Yang hadir memberikan keterangan

John NR Gobay, Peneas Lokbere, Victor C. Mambor, dan Budi Hernawan. Koalisi mengutuk aksi penembakan yang dilakukan anggota TNI dan Polri, dan meminta Komnas HAM RI turun ke Paniai melakukan investigasi lanjutan. (*suarapapua.com*)

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jogjakarta (FMPJ) menggelar aksi demonstrasi damai meminta Presiden Jokowi menuntaskan aksi brutalisme aparat keamanan yang terjadi di Paniai. Aksi dipimpin oleh Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Jogjakarta Aris Yeimo. (*merdeka.com*)

10 Desember

Pada pukul 10-00-14.00 WIT di Kantor DPR Papua, massa yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua melakukan aksi demonstrasi damai memperingati hari HAM Internasional. Aksi ini dipimpin Peneas Lokbere dan sejumlah pimpinan mahasiswa. Massa meminta Negara bertanggung jawab terhadap berbagai pelanggaran HAM berat di Tanah Papua, secara khusus menuntaskan penembakan empat pemuda di Kabupaten Paniai, Papua. Massa diterima sejumlah anggota DPR Papua dari Komisi I bidang Hukum, HAM dan Politik. (*suarapapua.com*)

Juru Bicara Komisariat Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Rupert Colville melalui Radio New Zealand (RNZ) mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa penembakan empat siswa di Enarotali, Paniai. Komisaris Tinggi PBB telah menyatakan peringatan pada pembunuhan tersebut, dan meminta tim investigasi independen Indonesia melakukan penelitian secara mendalam, dan mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. (*tabloidjubi.com*)

11 Desember

Pada pukul 11.00-13.00 WIT di Kantor P3W, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua.

Sejumlah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumene Gereja-Gereja Papua, dalam seruan moralnya dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri perayaan Natal nasional di Jayapura pada 27 Desember 2014. Para pimpinan gereja minta Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Ketiga pimpinan gereja yang hadir memberikan keterangan: Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan pendeta senior di lingkungan Gereja Kristen Injili (GKI) Papua Pdt. Selvi Titihalawa. (*suarapapua.com*)

12 Desember

Pada pukul 11.30-13.00 WIT di Kantor Elsham Papua, Padang Bulan, aktivis perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM melakukan jumpa pers mengutuk tindakan aparat keamanan yang melakukan penembakan terhadap sejumlah siswa di Paniai. Para aktivis perempuan juga meminta Negara membantu reparasi atau memberikan penyuluhan/pemulihan bagi korban trauma. Jumpa pers dihadiri oleh Frederika Korain, Sandra Mambrasar, Erna Mahuze, Pdt. Dora Balubun, dan sejumlah aktivis perempuan lainnya. (*suarapapua.com*)

Pada pukul 13.00-15.00 WIT di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Padang Bulan, Komnas HAM RI yang diwakili oleh Komisioner Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak memberikan keterangan pers terkait peristiwa penembakan di Paniai. Pihak Komnas HAM RI meminta TNI dan Polri membuka diri untuk menuntaskan kasus penembakan empat siswa yang menjadi sorotan berbagai media dan publik internasional. (*suarapapua.com*)

17 Desember

Pada pukul 11.00-13.00 WIB di Depan Istana Negara Jakarta organisasi masyarakat sipil di Jakarta yang tergabung dalam Papua

Itu Kita (PIK) menggelar aksi damai di Bundaran HI Jakarta. Massa mendesak pemerintahan Joko Widodo segera bertanggung jawab atas penembakan di Paniai dengan cara mendorong pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komnas HAM. (*suarapapua.com*)

18 Desember

Pada pukul 15.00-18.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, puluhan aktivis dari Papua Itu Kita melakukan aksi bakar lilin sebagai bentuk solidaritas Papua di Bundaran HI. Aksi tersebut untuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan empat orang warga Paniai pada 8 Desember 2014. Selain itu mendesak Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang independen dan meminta Presiden Jokowi bersuara tentang penembakan dan bentrokan tersebut. (*aktual.com*)

23 Desember

Filsuf dan Budayawan Katolik Romo Magnis Suseno, SJ menulis surat protes kepada Presiden Jokowi karena belum bersuara atas peristiwa penembakan empat siswa di Paniai. Magnis minta Jokowi berbicara, karena sudah hampir dua minggu Jokowi berdiam diri. (*thejakartapost.com*)

24 Desember

Gerakan Papua Itu Kita meluncurkan petisi terkait kasus Paniai Berdarah di *change.org*, berjudul “Komnas HAM, bentuk KPP HAM Paniai Berdarah 8 Desember 2014” di Jakarta. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh sekitar 14.105 pendukung. Para pendukung meminta Komnas HAM membentuk KPP HAM dengan basis UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, termasuk menuntaskan kasus Paniai Berdarah. (*change.org*)

Pada pukul 18.00 WIB di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat. Sejumlah masyarakat sipil serta pegiat Hak Asasi Manusia (HAM)

yang tergabung dalam gerakan Papua Itu Kita melakukan aksi lilin kemanusiaan/ibadah di Kantor Komnas HAM RI mendesak pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM) menyusul tragedi penembakan lima warga di Kabupaten Paniai, Papua. Aksi dipimpin oleh Zely Ariane dan sejumlah aktivis HAM dari LBH Jakarta. Peringatan tersebut turut dihadiri budayawan Franz Magnis-Suseno, sutradara Nia Dinata, aktivis HAM Andreas Harsono, Ketua Komnas HAM Farid Abbas, dan Komisioner Komnas HAM Perempuan Sylvana Apituley. (*suarapapua.com*)

26 Desember

Pada pukul 22.00 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat, sejumlah tokoh gereja, seperti Pdt. Dr. Benny Giay, Pdt. Bambang Widjaya (PGI), Romo Benny Susetyo (KWI), Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Agung Jakarta), Pdt. Phil Erari (PGI), Novel Matindas (PGI), dan Pdt. Krise Gosa, melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan sejumlah persoalan di Tanah Papua, termasuk kasus Paniai Berdarah. Jokowi berjanji akan berpidato soal Paniai pada perayaan Natal di Jayapura. (*suarapapua.com*)

27 Desember

Pada pukul 19.00 WIT di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal nasional. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014 lalu. “Dengan momen perayaan Natal ini, saya ingin menyampaikan, menyesalkan terjadinya kekerasan di Enarotali, Paniai, baru-baru ini. Saya ikut berempati kepada keluarga korban kekerasan.” (*suarapapua.com*)

3. KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA

2 Apri

Pihak Polsek Bandara Sentani menggagalkan penyelundupan

senjata api dan amunisi yang akan diterbangkan ke Wamena. Pemilik senjata dan amunisi melarikan diri dan pihak kepolisian masih melakukan pengejaran. Hal ini disampaikan Kapolsek Kawasan Bandara Sentani AKP Jubelina Wally. (*Bintang Papua*)

14 April

Pihak Polda Papua menyerahkan dua anggota inisial KM dan KW ke Kejaksaan Negeri Wamena pada Senin, 13 April 2014. Hal ini dimaksudkan untuk menjalani proses peradilan terkait kepemilikan senjata api rampasan. Dua orang tersebut adalah anggota dari KKB pimpinan Enden Wanimbo. (*Suluh Papua*)

15 September

Panglima Kodam XVIII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengatakan pihaknya siap membantu Polda Papua dalam melakukan penegakkan hukum dan menangkap kelompok sipil bersenjata (KSB). (*Bintang Papua*)

20 September

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyو Pudjo menjelaskan bahwa ada 18 senjata api yang dimiliki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Pegunungan Tengah Papua, termasuk di Lany Jaya sebagian besar diperoleh dari perampasan anggota kepolisian dan sebagian dari anggota TNI. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa 18 Senpi tersebut diperoleh dari penyerangan Pos Polisi di Kampung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada 4 Januari 2014 lalu. (*Cepos*)

3 November

Penyelidikan yang dilakukan Polda Papua terhadap sumber amunisi yang dimiliki oleh KKB membuahkan hasil. Lima orang yang diduga pelaku penjualan amunisi dibekuk di salah satu rumah yang ada di Jalan Rendani, Manokwari. Mereka adalah SD (26), SS (37), SH (45), LT (43) karena menyimpan senjata api ilegal. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, amunisi yang dijual tersangka

Briptu TJ kepada KKB bukan diambil dari gudang Kodim 1702/JWY ataupun jajaran Korem maupun pos-pos TNI, namun amunisi didapatkan dari luar. Hal ini diungkapkan oleh Dandim 1702/JWY C.D.B. Andira. (*Cepos*)

5 November

Senjata api dan ratusan amunisi yang diselundupkan dari Maluku yang diduga akan diperjualbelikan kepada KKB di Papua berhasil diamankan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono. (*Cepos & Suluh Papua*).

10 November

Pelaksana tugas Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan bahwa penyebutan antara OPM dengan KKB kerap digunakan politisi untuk menciptakan kondisi, sedangkan OPM memiliki pegangan ideologi dan memiliki organisasi yang lebih struktur dan tingkat komando yang jelas. Sedangkan KKB tidak jelas strukturnya dan cenderung beraksi di suatu wilayah yang dikuasai. (*Cepos*)

12 November

Tiga terdakwa kepemilikan senjata dan amunisi masing-masing TT, Deny W dan Eddy W dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jupiter Salian dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura. (*Cepos*)

4. KONFLIK DAN REKONSILIASI

6 Mei

Menurut data yang diperoleh Komnas HAM selama bulan terkahir ini sudah 18 orang meninggal dan terluka terkait konflik di Jayanti, Timika, Papua. Menurut anggota Komnas HAM Nurkolis, korban yang meninggal tersebut merupakan warga yang tidak terlibat dalam konflik. (*Suluh Papua & Cepos*)

Pangdam XVII/Cenderewasih Mayjen TNI Christian Zebua

yang disampaikan oleh Kasdam XVII/Cenderewasih Brigjen TNI Hinsa Siburian mengatakan bahwa di Papua masih sering terjadi pertikaian antar suku dan pendatang. Selain itu masih adanya gangguan keamanan dari kelompok yang berbeda paham. (*Cepos*)

Terkait konflik berkepanjangan di Jayanti, Kabupaten Mimika, Kapolres Mimika AKBP Jeremias Rontini mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan segala hal terkait konflik yang telah menelan 18 korban jiwa kepada pihak Kementerian Menkopolkum di Hotel dan Resto Cenderawasih 66, Mimika pada Senin, 5 Mei 2014. Proses penyelesaian konflik harus segera didiskusikan di tingkat provinsi, selain itu bagaimana bupati dan masyarakat mimika menyikapi konflik tersebut. (*Cepos*)

10 Mei

Konflik antar dua suku, Suku Moni dan Dani di Kompleks Jayanti, Distrik Kuala Kencana Mimika masih terjadi. Pada Jumat, 9 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 WIT terjadi perang antara kedua suku tersebut. Pihak keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi konflik tersebut. (*Cepos*)

12 Mei

Ketua Tim Peduli Perdamaian dan Konflik Mimika Anius Uamang mengatakan, Pemkab Mimika harus bersikap tegas mengatasi konflik di Mimika. Salah satu upaya yang harus dilakukan Pemkab Mimika adalah mefungsikan kepala-kepala suku yang sudah dilantik beberapa waktu yang lalu. Selain itu tokoh agama yang ada di Mimika harus bersatu untuk menyelesaikan konflik tersebut. (*Cepos*)

15 September

Panglima Kodam XVIII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengatakan pihaknya siap membantu Polda Papua dalam melakukan penegakkan hukum dan menangkap kelompok sipil bersenjata (KSB). (*Bintang Papua*)

Sebanyak 21 rumah penduduk yang ada di Kampung Warnyeti, Distrik Tanahrubuh, Manokwari Selatan dibakar oleh warga karena anggota keluarganya ditembak oleh warga suku lain. Kejadian ini terjadi pada Minggu, 14 September 2014 sekitar pukul 21,00 WIT. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyو. (*Cepos*)

20 September

Terkait dengan kasus penembakan warga di Nabire, Kilometer 74 Jalan Trans Distrik Diva, Kabupaten Nabire, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Sulistyو Pudjo mengatakan bahwa saat ini tim yang diketuai oleh Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea sedang melakukan penyelidikan bersama beberapa anggotanya di tempat penembakan. (*Cepos*)

15 Oktober

Dua kelompok warga di Wamena, Jayawijaya terlibat bentrok. Akibatnya seorang warga bernama Yuwedek Hubi (39) meninggal dunia dengan enam tusukan dan luka panah. Selain itu sebanyak lima unit rumah dan dua unit sepeda motor dibakar massa. Bahkan massa juga merusak Kantor Kampung Dokopku, Distrik Hubikiak. (*Cepos*)

5. DIALOG DAMAI

3 Januari

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Cristian Warinussy di Manokwari mengharapkan Presiden SBY segera membuka dialog Papua-Indonesia. Menurutnya, perkembangan politik lokal di Papua turut membawa pengaruh ke komunitas dunia internasional. (*Bintang Papua*)

24 Januari

Koordinator Solidaritas Nasional Papua (NAPAS) Zely Ariane menyerukan kepada Komite Subkomite Parlemen Uni Eropa di

Brussels untuk menekan Pemerintah Indonesia agar melanjutkan komitmen mereka melakukan dialog dengan orang Papua. Zely juga meminta Indonesia harus mengakui kondisi HAM di Papua adalah serius. Hal ini dikatakan Zely pada sidang dengar pendapat tentang situasi HAM di Papua yang digelar oleh Subkomite Parlemen Uni Eropa di Brussel pada Kamis, 23 Januari 2014. (*majalahselangkah.com*)

6 Mei

Wakil Dubes Swiss untuk Indonesia Daniel Derzic mengatakan bahwa ia sangat mendukung dialog di Papua. Hal ini dikatakannya ketika melakukan kunjungan ke Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura pada Senin, 5 Mei 2014. Sementara di Kodam XVII/Cenderawasih, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian mengatakan keadaan stabilitas di Papua saat ini dalam keadaan kondusif. Hal ini dikatakan Kasdam kepada Daniel ketika melakukan kunjungan kerja di Kodam XVII/Cenderawasih. (*Suluh Papua & Cepos*)

23 Mei

Di dalam Konferensi Nasional VI Jaringan Antar Iman Indonesia di Hotel Sentani, Papua pada Kamis, 22 Mei 2014 mendukung penuh dialog sebagai proses mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Menurut Ketua DPD RI Gusti Kajeng Ratu Hemas, dialog Papua-Jakarta untuk sementara terus didorong dan diupayakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dialog harus melibatkan semua pihak. (*Suluh Papua*)

Bab 6

LINTAS BATAS: KABUPATEN KEEROM

1. PERBATASAN KEEROM

8 Januari

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom Joko Susilo mengatakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Keerom di tahun 2013 telah melakukan pembukaan lahan sekitar 100 hektare yang dijadikan kebun kakao bagi warga. Anggaran pembukaan lahan bersumber dari dana Otsus sebesar Rp 2 miliar. (*Bintang Papua*)

10 Januari

Bupati Keerom Yusuf Wally pada Kamis, 9 Januari 2014 mengatakan Pemda Keerom mengalokasikan dana Otsus bagi pengembangan ekonomi produktif masyarakat asli Keerom. Mereka akan didampingi oleh LSM, Gereja dan TNI/Polri. Namun Yusuf tidak mengungkapkan berapa besar dana yang akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat tersebut. (*Bintang Papua*)

17 Januari

Bupati Keerom Yusuf Wally di Aula Bupati pada Jumat, 17 Januari 2014 mengatakan investor yang masuk di wilayah Keerom harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah. Selain itu masyarakat harus mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah demi kemakmuran masyarakat. (*Cepos & Bintang Papua*)

18 Januari

Bupati Keerom Yusuf Wally di Aula Bupati pada Jumat, 17 Januari 2014 mengungkapkan Pemda Keerom menyerahkan tanah seluas 1500 hektare untuk membangun 100 unit rumah bagi para transmigrasi di Senggi. Pada kesempatan itu bupati juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Senggi yang telah memberikan tanah ulayatnya. (*Cepos & Bintang Papua*)

20 Januari

Ketua Fraksi Golkar DPRD Keerom Syahabuddin menilai masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Keerom membutuhkan penanganan secara serius oleh Pemda. (*Suluh Papua*)

21 Januari

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom Yohanes Tawa di Gedung Perbatasan Jayapura pada Senin, 20 Januari 2014 mengungkapkan ada sekitar 3000 data penduduk yang dinyatakan invalid karena ada data ganda. Data yang ada di KPU

Keerom berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keerom. Di tempat lain, Ketua KPUD Keerom Bonefasius Bao mengatakan daftar pemilih tetap serta peserta Pemilu telah ditetapkan sebanyak 44.602 orang, terdiri dari Distrik Arso: 19.615 pemilih, Arso Timur: 4.68 pemilih, Distrik Senggi: 2.246 pemilih, Distrik Skamto: 11.585 pemilih, Distrik Waris: 1.953 pemilih dan Distrik Web: 1941 pemilih. (*Suluh Papua & Cepos*)

24 Januari

Masyarakat Waris menghentikan proyek pembangunan gapura perbatasan RI-PNG di Distrik Waris karena merasa dibohongi. Proyek tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom senilai Rp 460 juta. (*Bintang Papua & Cepos*)

8 September

Seorang ibu rumah tangga Catur Widiastuti (35) tewas karena dibacok oleh seorang pria berinisial HG (40) di Kampung Sanggaria, Arso 1, Kabupaten Keerom, pada Sabtu, 6 September 2014. Kejadian tersebut memicu kemarahan warga. Akibatnya, sebanyak 21 rumah kerabat pelaku dibakar massa. Menanggapi peristiwa tersebut, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw mengajak semua lapisan masyarakat di Kabupaten Keerom untuk bisa menahan diri dan tidak dikuasai rasa emosi agar situasi konflik sosial antar warga tidak terjadi dan meluas di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Keerom Herman Yoku menolak dengan tegas kelompok masyarakat yang sering membuat onar di wilayah hukum adat Kabupaten Keerom. (*Cepos dan Bintang Papua*)

20 September

Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nieu Guinea (PNG) sepakat untuk mempercepat pembangunan monumen persahabatan RI-PNG yang berada di Skouw-Wutung. Pasalnya kedua tim teknis dari kedua negara telah sepakat menentukan titik koordinat yang menjadi lokasi pembangunan monumen tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana Wanggai. (*Cepos*)

2 Oktober

Aparat Kepolisian dari Polres Keerom menemukan dua ladang ganja di Distrik Senggi Kabupaten Keerom, tepatnya di Kampung Yabanda yang berbatasan langsung dengan PNG. Penemuan ladang ganja ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap dua pengedar yang ditangkap di Distrik Skanto. (*Cepos*)